



PROFIL GENDER DAN ANAK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

2018

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat dan hidayah Nya kepada kita semua, sehingga Tim Penulis telah dapat menyelesaikan penulisan buku “ Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2018. Shalawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan buku ini dilakukan dalam rangka menyediakan data dan informasi gender dan anak di Kota Bukittinggi Tahun 2017. Dalam buku ini disajikan profil perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan. Buku ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bukittinggi.

Kami menyadari dalam penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan gender banyak masalah yang belum terpecahkan akibat dari kurang tersediaan data yang relevan sampai sekarang sehingga kesetaraan dan keadilan gender belum terwujud secara optimal. Diharapkan dengan adanya buku ini OPD dan stakeholder lainnya dapat memanfaatkannya sebagai bahan pengambilan kebijakan pembangunan di bidang masing-masing.

Buku ini dapat kami susun berkat adanya jalinan kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dengan beberapa pihak terkait.

Oleh karena itu pada kesempatan ini Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tim Penulis yang telah bekerjasama dalam melaksanakan penulisan buku ini
2. Bapak / Ibu Kepala OPD , Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, Organisasi Perempuan dan LSM di Kota Bukittinggi yang telah memberikan berbagai sumbangan pemikiran saran dan masukan yang sangat berarti untuk kesempurnaan buku ini.
3. Bapak/ ibu anggota kelompok kerja Data terpilah Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2018, yang telah berpartisipasi aktif dalam memberika

sumbangan saran /pemikiran dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan buku ini.

Semoga semua dukungan dan bantuan yang diberikan menjadi amal shaleh disisiNya.

Kami menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala kritik, saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, Agustus 2018
Kepala Dinas P3APPKB
Kota Bukittinggi

TATI YASMARNI, SE, MM

NIP. 19630629 198302 22001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Sumber Data	2
E. Sistematika Penyajian	2
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH	5
A. Letak Geografis	5
B. Batas Administrasi Wilayah	5
C. Topografi	5
BAB 3 DATA GENDER BIDANG KEPENDUDUKAN	8
A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin	8
B. Penyebaran Penduduk	5
C. Penduduk Produktif	11
D. Komposisi Penduduk Menurut Wajib KTP	13
E. Kepemilikan Akte Kelahiran untuk Anak	14
F. Komposisi penduduk menurut Status Perkawinan	15
G. Kepala Keluarga Perempuan	16
BAB IV DATA PERSPEKTIF DAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN	18
A. Angka Partisipasi Kasar	19
B. Angka Partisipasi Murni	23
C. Angka Partisipasi Sekolah	27
D. Melek Huruf dan Buta Huruf	29
E. Angka Putus Sekolah	29
F. Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi	30
G. Rata - rata lama sekolah	30
H. Sertifikasi Guru	31
I. Angka kelulusan Paket A,B, C	32
J. Sekolah Luar Biasa (SLB)	32
BAB V DATA PERSPEKTIF DAN GENDER BIDANG KESEHATAN	33
A. PELAYANAN KESEHATAN IBU	33
1. Angka Kematian Ibu (AKI)	33
2. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Linakes) dengan Kompetensi Kebidanan	35
3. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kebidanan	35
B. PELAYANAN KESEHATAN ANAK	
1. Angka Kematian Bayi (AKB)	36
2. Angka Kematian Balita (AKABA)	36
3. Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif (0-6 bulan)	38

4. Pelayanan Kesehatan Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	40
5. Cakupan Kunjungan Bayi	40
6. Cakupan Kunjungan Anak Balita	41
7. Pelayanan Imunisasi Lengkap Pada Bayi	43
a. Imunisasi Hb 0	43
b. Imunisasi CG	43
c. Imunisasi DPT-HB3/DPT-HB-ib3	44
d. Imunisasi Polio	45
e. Imunisasi Campak	45
f. Imunisasi Dasar Lengkap	46
8. Upaya penanggulangan Gizi Buruk pada Balita	49
9. Penderita Tuberkulosis (TB Paru)	49
10. Penderita HIV/AIDS	50
11. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	51
12. Posyandu	53
13. Keluarga Berencana	53
14. Usia Perkawinan Pertama	55
15. Penggunaan Narkotika, Psikotropika, zat adiktif lainnya (NAPZA)	56
BAB VI. EKONOMI DAN KETENAGA KERJAAN	55
A. Angkatan Kerja	55
B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	58
C. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
D. Lapangan Usaha	
E. Status Pekerjaan Pekerja di Sektor Formal dan Informal	
F. Usaha Mikro dan Kecil (UKM)	
G. Keanggotaan Koperasi	
H. Kepala Keluarga Miskin	
I. Tenaga Kerja Migran	
J. Pekerja pada Instansi Lembaga Pemerintah	
K. Tenaga Kerja Per Perusahaan/Unit Kerja	
BAB VII BIDANG POLITIK DAN PENGAMBIL KEPUTUSAN	
A. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	
B. Peran dan Komposisi Perempuan di Lembaga Eksekutif	
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	
2. Perempuan Menduduki Jabatan Eselon	
3. Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin	
4. Camat	
5. Jumlah Lurah di Kota Bukittinggi	
C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif	
1. Jaksa menurut jabatan dan jenis kelamin	
2. Hakim menurut Jabatan dan jenis kelamin	
3. Polisi menurut Jabatan dan jenis kelamin	
D. Pengurus organisasi sosial , kemasyarakatan dan politik	
1. Data Organisasi Sosial , Kemasyarakatan	
2. Pengurus harian Partai Politik	
3. Kaukus perempuan politik	

4. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

BAB VIII BIDANG HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

A. Bidang Hukum.....

B. Bidang Sosial Budaya.....

BAB VIII BIDANG HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

A. Bidang Hukum.....

B. Kebijakan/ Program Kegiatan Yang Responsif Gender Kota Bukittinggi

C. Bidang Sosial Budaya.....

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Bukittinggi	7
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur Kota Bukittinggi Tahun 2017	9
Tabel 3.2	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Bukittinggi	10
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk yang wajib memiliki KTP dan telah memiliki KTP Elektronik per kecamatan kota Bukittinggi	14
Tabel 3.4	Persentase Penduduk 10 tahun ke atas menurut Status Perkawinan tahun 2017	16
Tabel 3.5	Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kota Bukittinggi tahun 2017	16
Tabel 4.1	Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan SD,SLTP, dan SLTA dan jenis kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2016	24
Tabel 4.2	Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan SD,SLTP, dan SLTA dan jenis kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2017	24
Tabel 4.3	Angka Partisipasi Sekolah menurut kelompok Umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun) dan Jenis kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2017	28
Tabel 4.4	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke atas menurut jenis kelamin dan partisipasi sekolah di Kota Bukittinggi tahun 2017	28
Tabel 4.5	Angka Putus Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin per Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2017	29
Tabel 4.6	Persentase pendidikan tertinggi yang di tamatkan penduduk umur 15 tahun keatas menurut jenis kelamin Kota Bukittinggi tahun 2017	31
Tabel 4.7	Jumlah SLB Negeri dan Swasta per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017	32
Tabel 5.1	Cakupan Persalinan yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan (Linakes) per Kecamatan Kota Bukittinggi tahun 2017	35
Tabel 5.2	Cakupan Pelayanan Ante Natal Care per Kecamatan Kota Bukittinggi tahun 2017	36
Tabel 5.3	Jumlah Kematian Bayi per Kecamatan per Jenis Kelamin Kota Bukittinggi tahun 2017	37
Tabel 5.4	Jumlah Kematian Anak per Kecamatan per Jenis Kelamin Kota Bukittinggi tahun 2017	38
Tabel 5.5	Cakupan Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif Per Kecamatan Kota Bukittinggi tahun 2017	39
Tabel 5.6	Cakupan BBLR yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Per Kecamatan Kota Bukittinggi tahun 2017	40
Tabel 5.7	Cakupan Kunjungan Bayi ke Pelayanan Kesehatan per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017	41
Tabel 5.8	Cakupan Kunjungan Bayi Anak Balita ke Pelayanan Kesehatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017	42
Tabel 5.9	Cakupan Imunisasi HB 0 per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2017	43
Tabel 5.10	Cakupan Imunisasi BCG per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2017	44
Tabel 5.11	Cakupan Imunisasi DPT-HB3/DPT-HB-Hib3 per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2017	44

Tabel 5.12 Cakupan Imunisasi Polio per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2017	45
Tabel 5.13 Cakupan Imunisasi Campak per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2017	46
Tabel 5.14 Cakupan Imunisasi Lengkap per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2017	46
Tabel 5.15 Cakupan Balita Bawah Garis Merah Kota Bukittinggi Tahun 2017.....	47
Tabel 5.16 Angka Kesembuhan dan Pengobatan Lengkap TB Paru BTA + Per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2017	47
Tabel 5.17 Cakupan Penderita HIV/AIDS berdasarkan Kelompok Umur Kota Bukittinggi Tahun 2017.....	51
Tabel 5.18 Persentase Rumah Tangga ber PHBS Per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2017	52
Tabel 5.19 Jumlah Posyandu menurut Strata Posyandu per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2017.....	53
Tabel 5.20 Jumlah Peserta KB Aktif Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017	54
Tabel 5.21 Peserta KB Baru (PB) per kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017..	55
Tabel 5.22 Usia Perkawinan Pertama di Kota Bukittinggi tahun 2017.....	56
Tabel 6.1 Jumlah penduduk Berusia 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dan jenis kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2017	57
Tabel 6.2 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2017	58
Tabel 6.3 Jumlah Penduduk yang bekerja menurut Lapangan Usaha di Kota Bukittinggi Tahun 2017.....	59
Tabel 6.4. Jumlah Pedagang yang berusaha pada petak toko dan los menurut lokasi di Kota Bukittinggi 2016	60
Tabel 6.5. Jumlah Penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja seminggu yang lalu menurut status pekerjaan Utama di Kota Bukittinggi Tahun 2017	60
Tabel 6.6. Jumlah penduduk yang berkerja menurut status Formal dan Informal di Kota Bukittinggi Tahun 2017	61
Tabel 6.7. Jumlah Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) Kota Bukittinggi Tahun 2016.....	62
Tabel 6.8. Data Jumlah Tenaga Kerja menurut Jenis Kelamin pada UMKM Kota Bukittinggi Tahun 2016.....	63
Tabel 6.9 Data Umum Industri di Kota Bukittinggi	63
Tabel 6.10 Partisipasi Perempuan sebagai Pengurus Koperasi di Kota Bukittinggi tahun 2017	65
Tabel 6.11 Persentase Kepala Keluarga Miskin di Kota Bukittinggi tahun 2017	66
Tabel 6.12 Tenaga Kerja di Lembaga/BUMN/BUMD/Instansi Vertikal.....	66
Tabel 6.13 Tenaga Dosen, Karyawan Dan Mahasiswa Perguruan Tinggi Tahun 2017 Di Kota Bukittinggi	66
Tabel 6.14. Jumlah Tenaga Kesehatan (Medis) di Kota Bukittinggi Tahun 2017	67
Tabel 7. 1 Jumlah Anggota DPRD Kota Bukittinggi menurut partai dan Jenis Kelamin, Kota Bukittinggi Tahun 2017	69

Tabel 7.2	Jumlah Anggota DPRD Kota Bukittinggi menurut Komisi dan Jenis Kelamin, Kota Bukittinggi Tahun 2017	71
Tabel 7.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin , Kota Bukittinggi Tahun 2017	72
Tabel 7.4	Jumlah PNS menurut golongan ruang dan jenis kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2017	72
Tabel 7.5	Jumlah PNS menurut Esselon dan Jenis Kelamin , Kota Bukittinggi Tahun 2018	73
Tabel. 7.6	Jumlah Tenaga Pegawai Negeri Sipil menurut jenis Kelamin Tahun 2018.	74
Tabel 7.7	Jumlah Camat di Kota Bukittinggi Tahun 2017	74
Tabel.7.8	Jumlah Lurah menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	75
Tabel 7.9	Jumlah Pegawai dilingkungan Kementerian Agama berdasarkan jenis kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2017	76
Tabel. 7.10	Data ketenagaan pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi	76
Tabel. 7.11	Data Hakim menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017	77
Tabel. 7.12	Data Kepolisian menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017..	77
Tabel. 7.13	Data Organisasi Sosial,kemasyarakatan dan Politik Tahun 2017	78
Tabel.7.14	Data Pengurus harian Partai Politik Kota Bukittinggi tahun 2017.....	79
Tabel. 7.15	Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Bukittinggi menurut Jenis Kelamin	80
Tabel 8.1	Kebijakan/Program/Kegiatan yang Responsif Gender Kota Bukittinggi .	
Tabel 8.2	Peraturan dan Kebijakan Daerah yang Responsif Gender	
Tabel 8.3	Peraturan dan Kebijakan Daerah yang terkait Perlindungan Perempuan dan Anak	
Tabel 8.4.	Daftar Lembaga Masyarakat/Organisasi Masyarakat/LBH yang Peduli Perempuan dan Anak Tahun 2015 sd 2017	
Tabel 8.5	Jumlah Anak Jalanan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2015,2016 dan 2017	
Tabel 8.6	Jumlah Anak Terlantar (Karena Putus Sekolah) Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2015,2016 dan 2017.....	
Tabel 8,7	Jumlah Anak yang Ditampung di Panti Asuhan dan Non Panti Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2015,2016 dan 2017.....	
Tabel 8.8	Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2015,2016 dan 2017.....	
Tabel 8.9	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2015 sd 2017	
Table 8.10	Jumlah penduduk Usia 60 tahun ke atas berdasarkan tingkat Pendidikan Tahun 2017	

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		HALAM AN
Gambar 2.1	Peta Kota Bukittinggi.....	6
Gambar 3.1	Komposisi Penduduk menurut kelompok umur produktif Bukittinggi	11
Gambar 3.2	Komposisi penduduk menurut kelompok umur produktif kota Bukittinggi.....	12
Gambar 3.3	Persentase Penduduk Produktif berdasarkan jenis kelamin di Kota Bukittinggi tahun 2017	12
Gambar 3.4	Persentase Anak usia 0-17 tahun yang memiliki Akte kelahiran di Kota Bukittinggi	15
Gambar 4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa SD Laki-laki per Kecamatan di Kota Bukittinggi	19
Gambar 4.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa SD Perempuan per Kecamatan di Kota Bukittinggi	20
Gambar 4.3	APK Siswa SD menurut jenis Kelamin Kota Bukittinggi tahun 2017.....	20
Gambar 4.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa SMP Laki-laki per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017	21
Gambar 4.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa SD Perempuan per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017	21
Gambar 4.6	APK Siswa SLTP Menurut jenis Kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2017	22
Gambar 4.7	Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa SLTA per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017	22
Gambar 4.8	Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa SLTA per Jenis Kelamin Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017	23
Gambar 4.9	Perbandingan APM siswa SD Tahun 2015, 2016 dan 2017 berdasarkan jenis kelamin Kota Bukittinggi	25
Gambar 4.10	APM Siswa SD Laki-laki Per Kecamatan di Kota Bukittinggi 2017	25
Gambar 4.11	APM Siswa SD Perempuan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi 2017.....	26
Gambar 4.12	APM Siswa SLTP Laki-laki Per Kecamatan di Kota Bukittinggi 2017.....	26
Gambar 4.13	APM Siswa SLTP Perempuan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi 2017.....	26
Gambar 4.14	APM Siswa SLTP Tahun 2015, 2016 dan 2017 di Kota Bukittinggi.....	27
Gambar 4.15	Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf menurut jenis kelamin di Kota Bukittinggi	29
Gambar 4.16	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi yang dimiliki di Kota Bukittinggi tahun 2016	30
Gambar 4.17	Jumlah guru negeri yang di Sertifikasi menurut jenjang pendidikan dan jenis Kelamin di Kota Bukittinggi	31
Gambar 4.18	Jumlah Angka kelulusan Paket A,B, C berdasarkan jenis kelamin Kota Bukittinggi tahun 2017	32
Gambar 5.1	Jumlah Kematian Ibu di Kota Bukittinggi tahun 2017	34
Gambar 5.2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Bukittinggi 2015- 2017	37

Gambar 5.3	Persentase penggunaan Kontrasepsi Modern yang pernah digunakan di Kota Bukittinggi Tahun 2017	54
Gambar 5.4.	Jumlah penyalahgunaan Narkoba yang ditangani oleh penegak hukum di Kota Bukittinggi Tahun 2016 dan 2017	57
Gambar 6.1.	Angkatan Kerja dan bukan Angkatan Kerja menurut jenis kelamin tahun 2017.....	.61
Gambar 6.2	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut jenis kelamin di Bukittinggi Tahun 2015 dan 2017	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perspektif gender, penyediaan data, analisis dan pelaporan terpilah menurut jenis kelamin dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi tentang pengalaman khusus dalam kehidupan sebagai perempuan dan pengalaman sebagai laki-laki. Data menurut jenis kelamin ini merupakan data dasar untuk melakukan analisa gender dan harus dikombinasi dengan variable-variabel lainnya (sesuai dengan keperluannya) seperti umur, pendidikan, status sosial-ekonomi, latarbelakang budaya, kecacatan. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin juga menjadi inti dalam menghasilkan Gender Statistik yaitu informasi yang mengandung isu gender , sebagai hasil dari analisis gender

Platform Tindak Lanjut kesepakatan Konperensi Perempuan Sedunia di Beijing (Beijing Platform for Action, 1995) yang meminta layanan statistik ditingkat nasional (sub-nasional), regional dan internasional menghasilkan: (1) statistik yang berkaitan dengan individu, dikumpulkan, disusun, dianalisa dan disampaikan menurut jenis kelamin dan umur; dan yang mencerminkan masalah/isu yang berkaitan dengan kehidupan perempuan dan kehidupan laki-laki dalam masyarakat (United Nations, 1995, pasal 206 (a). Di Indonesia mengenai data terpilah ini tercantum dalam Inpres no.9 Tahun 2000.

Penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan umur serta analisisnya menjadi suatu keharusan, khususnya terkait dengan input bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) diseluruh bidang pembangunan serta untuk pengembangan kebijakan yang responsif gender. (Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000).

Untuk itu diperlukan pelembagaan data terpilah yang masuk kedalam data sistem; pemutakhiran data secara periodik; dilengkapi peraturan dan mekanisme yang mendukung; serta sumberdaya manusia yang paham dan terampil dalam melakukan analisa/ menghasilkan gender statistik.

B. Tujuan

Penyusunan buku ini bertujuan untuk :

1. Memperkuat kelembagaan terkait pengelolaan data gender dan anak.
2. Membangun mekanisme dan mendorong pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi dalam upaya ketersediaan data gender dan anak di Kota Bukittinggi.
3. Mendorong pemanfaatan data gender dan anak untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak di Kota Bukittinggi.
4. Meningkatkan komitmen pemerintah Kota Bukittinggi dalam melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data Informasi Gender dan Anak
5. Sebagai bahan untuk mengambil kebijakan untuk perencanaan pembangunan yang responsif gender melalui PPRG

C Sumber Data

Data-data yang disajikan dalam Profil Gender dan anak Kota Bukittinggi Tahun 2018 ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2018 sesuai Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : / / DP3APPKB/PUG PP/IV/2018 tanggal April 2018.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Buku Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I	: Pendahuluan
	A. latar Belakang
	B. Tujuan
	C. Sumber Data
	D. Sistematika Penyajian

- BAB II : Gambaran Umum Wilayah
- A. Letak Geografis
 - B. Batas Administrasi Wilayah
- BAB III Kependudukan
- A. Penduduk menurut Jenis Kelamin
 - B. Penyebaran Penduduk
 - C. Penduduk Produktif
 - D. Komposisi Penduduk Menurut KTP
 - E. Kepemilikan Akte Kelahiran untuk anak
 - F. Komposisi Penduduk menurut status perkawinan
 - G. Kepala Keluarga Perempuan
- BAB IV Profil Gender dan Anak Bidang Pendidikan
- A. Angka Partisipasi Kasar
 - B. Angka Partisipasi Murni
 - C. Angka Partisipasi Sekolah
 - D. Angka Melek Huruf
 - E. Angka Putus Sekolah
 - F. Penduduk menurut Jenis Pendidikan Tertinggi
 - G. Rata-rata lama sekolah
 - H. Serifikasi guru
 - I. Angka kelulusan Paket A,B,C
 - J. Sekolah Luar Biasa (SLB)
- BAB V Profil Gender dan Anak Bidang Kesehatan
- A. Pelayanan Kesehatan Ibu
 - B. Pelayanan Kesehatan Anak
 - C. HIV/ AIDS
 - D. Keluarga Berencana
 - E. Usia Perkawinan Pertama
 - F. Pengguna NAPZA

- BAB VI. Ekonomi dan Ketenagakerjaan
- A. Angkatan Kerja
 - B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
 - C. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
 - D. Lapangan Usaha
 - E. Satus Pekerjaan Pekerja di sektor Formal dan Informal
 - F. Usaha Mikro dan Kecil (UKM)
 - G. Koperasi
 - H. Kepala Keluarga Miskin
- BAB VII Perempuan di bidang Politik dan Pengambil Keputusan
- A. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif
 - B. Peran dan Komposisi Perempuan di Lembaga Eksekutif
 - C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif
 - D. Pengurus Organisasi Sosial, kemasyarakatan dan politik
- BAB VIII Hukum dan Sosial Budaya
- A. Bidang Hukum
 - B. Bidang Sosial Budaya
- BAB IX. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- A. Kekerasan Terhadap Perempuan
 - B. Kekerasan terhadap Anak
- BAB X. Penutup
- A. Kesimpulan
 - B. saran

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. Letak Geografis dan Batas Administrasi Wilayah

Kota Bukittinggi adalah sebuah kota yang terletak di bagian utara Provinsi Sumatera Barat. Dua kata yang terhimpun jadi satu, mempunyai makna identik dengan letaknya pada ketinggian perbukitan. Kota ini memiliki luas 25,24 km² membentang antara 100°20' - 100°25' Bujur Timur dan antara 00°16' - 00° 20' Lintang Selatan.

Posisi ini menjadikan iklim di Bukittinggi masuk kedalam iklim tropis. Letak Bukittinggi pada ketinggian antara 780 - 950 meter diatas permukaan laut, menyebabkan udara di Bukittinggi relatif sejuk dengan suhu berkisar antara 16.1–24.9 °C dan cocok untuk tempat peristirahatan dan tujuan wisata.

Letak geografis ini cukup strategis, terutama bila dikaitkan dengan posisi sentral Bukittinggi terhadap lintasan regional antar ibukota provinsi, seperti lintasan dari Padang ke Medan, dan lintasan dari Padang ke Pekanbaru.

B. Batas Administrasi Wilayah

Secara administrasi Kota Bukittinggi berbatasan dengan beberapa wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Agam, yaitu :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Nagari Gadut dan Kapau; Kecamatan Tilatang Kamang; Kabupaten Agam.
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Nagari Banuhampu; Kecamatan Banuhampu Sungai Puar; Kabupaten Agam.
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Nagari Sianok, Guguk, dan Koto V Gadang; Kecamatan IV Koto; Kabupaten Agam.
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang; Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam.

Bukittinggi merupakan pusat kebudayaan Sumatera Barat, terletak di dataran tinggi sebelah utara Padang di bukit Agam. Berbeda dengan Padang yang merupakan pusat roda pemerintahan dan perdagangan modern maka Bukittinggi adalah kota yang tenang dihiasi oleh panorama alam yang sungguh tiada duanya. Lembahnya yang sangat terkenal adalah Ngarai Sianok dengan kedalaman 100 M dan kemiringan antara 800 – 900 adalah salah satu daya tarik kota Bukittinggi dijadikan sebagai kota wisata.

Kota Bukittinggi memiliki nama lain yaitu Tri Arga yang artinya tiga pegunungan agung yang memberikan keberuntungan. Keagungan Gunung Merapi, Gunung Singgalan dan, Gunung Sago pun ikut menghiasi moleknnya kota Jam Gadang ini. Kota Bukittinggi adalah nama sebuah kota yang terletak di bagian utara Provinsi Sumatera Barat.

Kota ini memiliki topografi berbukit-bukit dan berlembah, beberapa bukit tersebut tersebar dalam wilayah perkotaan, di antaranya Bukit Ambacang, Bukit Tambun Tulang, Bukit Mandiangin, Bukit Campago, Bukit Kubangankabau, Bukit Pinang Nan Sabatang, Bukit Canggung, Bukit Paninjauan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat lembah yang dikenal dengan [Ngarai Sianok](#) dengan kedalaman yang bervariasi antara 75–110 m, yang di dasarnya mengalir sebuah sungai yang disebut dengan Batang Masang.

PETA KOTA BUKITTINGGI



Luas wilayah Kota Bukittinggi adalah 25,24 km² dengan perincian luas per kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Guguk Panjang	6,831	27,06
2.	Mandiingin Koto Selayan	12,156	48
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	6,252	24,77
	Jumlah	25,24	100

Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2017

BAB III

DATA GENDER BIDANG KEPENDUDUKAN

Data kependudukan salah satunya digunakan untuk melihat tren dinamika penduduk sebagai monitoring dan evaluasi program pembangunan. Penduduk merupakan sumber daya manusia yang melakukan dan melaksanakan pembangunan sekaligus merupakan objek atau sasaran pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus komponen output dalam pembangunan. Oleh karena itu pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahannya mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

A. Penduduk menurut Jenis kelamin

Dinamika penduduk dapat dilihat dari perubahan struktur dan komposisinya menurut umur dan jenis kelamin. Proyeksi penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebesar 126.804 jiwa . Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan disajikan melalui angka rasio jenis kelamin (sex ratio). Sex Ratio penduduk Kota Bukittinggi sebesar 94,44. Artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 94 penduduk laki-laki. Angka sex ratio yang lebih kecil dari 100 ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dari penduduk laki-laki.

Distribusi penduduk Kota Bukittinggi menurut jenis kelamin tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur Kota Bukittinggi Tahun 2017

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH PENDUDUK			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI+ PEREMPUAN	RASIO JENIS KELAMIN
1	2	3	4	5	6
1	0 – 4	6409	6245	12654	102.63
2	5 – 9	5950	5844	11794	101.81
3	10 – 14	5171	5091	10262	101.57
4	15 – 19	6000	7376	13376	81.34
5	20 – 24	5844	7796	13640	74.96
6	25 – 29	5263	5227	10490	100.69
7	30 – 34	4772	4665	9437	102.69
8	35 – 39	4426	4384	8810	100.96
9	40 – 44	4060	4157	8217	97.67
10	45 – 49	3736	3563	7299	104.86
11	50 – 54	3005	2912	5917	103.19
12	55 – 59	2505	2616	5121	95.76
13	60 – 64	1890	1915	3805	98.69
14	65 – 69	1166	1279	2445	91.16
15	70 – 74	689	899	1588	76.64
16	75+	702	1247	1949	56.30
JUMLAH		61.588	65.216	126.804	94,44
ANGKA BEBAN TANGGUNGAN (<i>DEPENDENCY RATIO</i>)				47	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi

Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yaitu 65.216 jiwa berbanding 61.588 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 94,44 yang artinya dari 100 orang penduduk perempuan terdapat 94 orang laki-laki.

B. Penyebaran penduduk

Konsentrasi penduduk disuatu wilayah dapat di pelajari dengan menggunakan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah

tersebut. Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk.

Tabel. 3.2. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km^2)	JML PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK <i>per km²</i>
1	2	3	4	5
1	Guguk Panjang	6,831.0	48,752	7.137
2	Mandiingin Koto Selayan	12,156.0	48,492	3.989
3	Aur Birugo Tigo Baleh	6,252.0	29,560	4.728
JUMLAH (KAB/KOTA)		25,239.0	126,804	5.024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi

Penyebaran penduduk Kota Bukittinggi paling banyak adalah di kecamatan Guguk Panjang yaitu 48.752 jiwa (38,45%) dan paling sedikit di kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh yaitu 29.560 jiwa (23,3%).

Namun Kecamatan dengan tingkat kepadatan yang paling tinggi yaitu kecamatan Guguk Panjang yaitu 7.137 jiwa per km^2 , diikuti oleh kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 4.728 jiwa per km^2 dan kecamatan Mandiingin Koto Selayan sebanyak 3.989 jiwa per km^2 .

Ditinjau dari penyebaran penduduk berdasarkan luas daerah, kepadatan penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2017 sudah tergolong sangat padat, yaitu 5.024 jiwa per km^2 . Berarti tiap km^2 terhuni oleh penduduk sebanyak 5.024 jiwa. Penyebaran penduduk pada tahun 2017 meningkat sekitar 83 jiwa dibandingkan dengan penyebaran penduduk pada tahun 2016 sebesar 4.941 per km^2 .

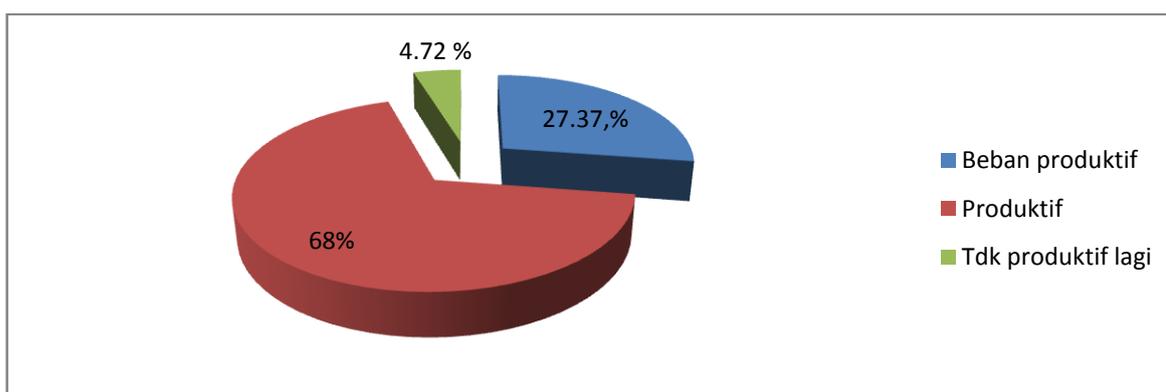
Berdasarkan klasifikasi kepadatan penduduk menurut kabupaten dan kota menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Kota Bukittinggi termasuk klasifikasi sangat padat dan merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk paling

tinggi dibandingkan dengan 18 kabupaten/kota lain di Propinsi Sumatera Barat. Kepadatan penduduk kota Bukittinggi yang demikian disebabkan salah satunya karena wilayah Kota Bukittinggi sendiri hanya mencakup 0.06% saja dari total luas Propinsi Sumatera Barat disamping berkembangnya kota Bukittinggi sebagai kota wisata dan kota pendidikan di Sumatera Barat.

C. Penduduk Produktif

Komposisi penduduk menurut kelompok umur produktif digolongkan menjadi tiga, yaitu produktif (15- 64 tahun), belum produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (65 tahun keatas).

Gambar 3.1 Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur Produktif Kota Bukittinggi Tahun 2017.



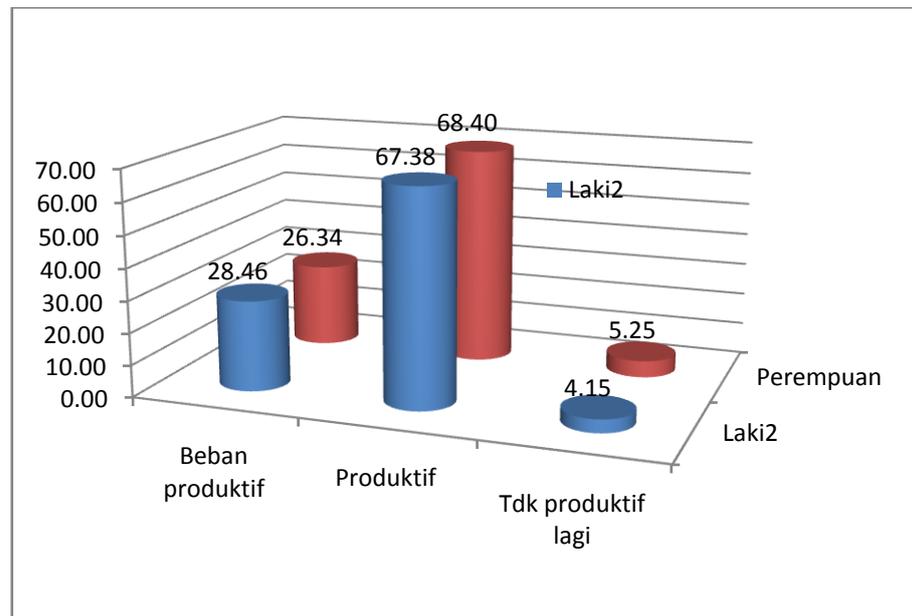
Sumber : BPS Kota Bukittinggi

Gambar 3.1. menunjukkan bahwa 27,37% penduduk Kota Bukittinggi berusia 0-14 tahun, 68% penduduk berusia 15-64 tahun, dan 4,72% penduduk berusia 65 tahun ke atas.

Bila dilihat secara gender, akan terlihat bahwa penduduk berjenis kelamin perempuan yang produktif lebih banyak daripada laki-laki.

Gambar 3.2. berikut memperlihatkan tentang beban produktifitas menurut jenis kelamin.

Gambar 3.2. Grafik Angka Produktif Kota Bukittinggi menurut Jenis Kelamin Tahun 2017

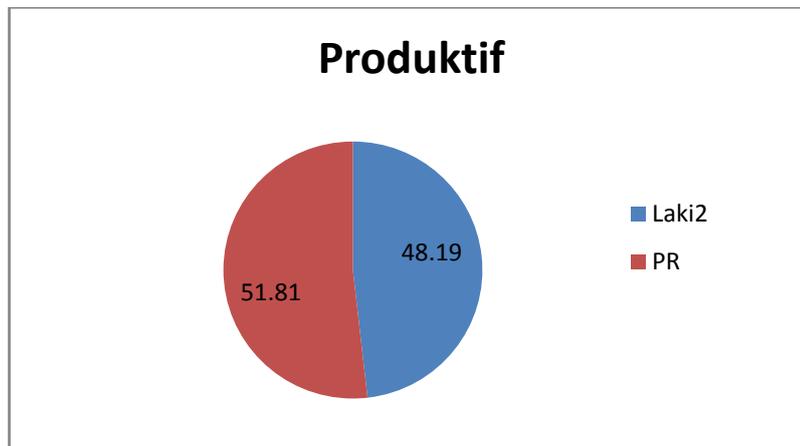


Angka ketergantungan (dependency ratio) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin rendah angka dependency ratio maka peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi. Rendahnya angka ketergantungan menunjukkan tingginya proporsi penduduk usia produktif relative terhadap penduduk usia belum/ tidak produktif. Sehingga secara ekonomi akan semakin besar peluang untuk menghasilkan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin rendahnya dependency ratio juga menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi sehingga nilai tambah perkapita akan semakin tinggi, hal ini berarti peningkatan kesejahteraan penduduk.

Dependensi ratio Kota Bukittinggi adalah 47 yang berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 47 orang penduduk usia tidak produktif.

Bila dilihat berdasarkan gender, maka penduduk perempuan yang produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang produktif. Seperti digambarkan pada gambar 3.3 berikut.

Gambar 3.3 Presentasependudukproduktifberdasarkanjeniskelamindi KotaBukittinggitahun 2017



Jika dilihat berdasarkan kelompok usia, pada usia muda angka ketergantungan penduduk laki-laki lebih besar dari pada perempuan, sedangkan pada usia tua, angka ketergantungan perempuan lebih besar dari pada laki-laki. Hal ini berhubungan dengan rasio jenis kelamin, dimana pada usia muda rasio jenis kelamin diatas angka 100, sedangkan pada usia tua rasio jenis kelamin berada dibawah angka 100. Tingginya angka ketergantungan perempuan pada usia tua akan berdampak pada social ekonomi, yang dibutuhkan pada usia tua, jaminan sosial, fasilitas kesehatan, serta fasilitas social ekonomi lainnya untuk lansia harus diprioritaskan pada perempuan.

Jumlah golongan penduduk usia tua(75+)juga cukup besar, terutama perempuan. Hal ini dapat dimaknai dengan semakin tingginya usia harapan hidup, terutama perempuan. Kondisi ini menuntut kebijakan terhadap penduduk usia tua. Bertambahnya jumlah penduduk tua dapat dimaknai sebagai meningkatnya tingkat kesejahteraan, meningkatnya kondisi kesehatan tetapi juga dapat dimaknai sebagai beban karena kelompok usia tua ini sudah tidak produktif lagi.

D. Komposisi Penduduk Menurut Wajib KTP

Seluruh penduduk yang telah berusia 17 tahun keatas wajib memiliki identitas kewarganegaraan atau yang dikenal dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti dari yang

diterbitkan oleh Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada tahun 2017 di Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa 94% penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP Elektronik, dimana penduduk laki-laki sebesar 49,15% (38.226 orang) dan penduduk perempuan sebesar 50,85% (39549 orang). Hal ini menunjukkan lebih tingginya partisipasi perempuan dalam pengurusan KTP.

Tabel. 3.3. Jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP dan telah memiliki KTP Elektronik per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017.

No	Kecamatan	Wajib KTP			KTP Elektronik		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Mandiingin Koto Selayan	17.339	17.486	34.825	16.115	16.490	32.605
2	Guguk Panjang	15.009	15.304	30.313	13.833	14.371	28.204
3	Aur Birugo Tigo Baleh	8.628	8.957	17.585	8.278	8.688	16.966
	Kota Bukittinggi	40.976	41.747	82.723	38.226	39.549	77.775

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2017

Bila dilihat perkembangan kepemilikan KTP Elektronik dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, terlihat peningkatan yang signifikan pada tahun 2016 dan kembali menurun pada tahun 2017.

E. Kepemilikan Akte Kelahiran untuk anak

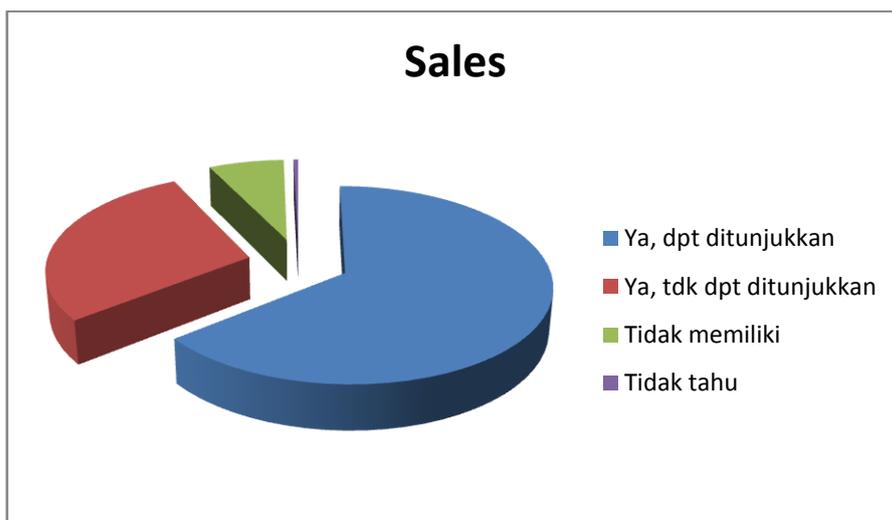
Hak Sipil anak adalah hak asasi yang melekat pada pribadi seseorang (anak) sebagai seorang individu unik ditengah masyarakat sehingga ia bisa mengembangkan kemampuan dan kepribadiannya secara leluasa termasuk hak identitas anak. Sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 5, yaitu “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan” dan pasal 27 ayat 1 yaitu “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak

kelahirannya,” ayat 2 identitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akte kelahiran. Lebih lanjut Akte Kelahiran tersebut merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap warga negaranya.

Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 juga mengatur bahwa untuk memiliki akta kelahiran tidak dikenakan biaya (gratis), namun masih ada anak yang belum mempunyai akte kelahiran dengan berbagai alasan.

Dari hasil survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2015 diketahui bahwa di Kota Bukittinggi sekitar 92,75% anak yang memiliki akte kelahiran, 6,85% tidak memiliki akte kelahiran dan 0,4% menjawab tidak tahu. seperti terlihat pada gambar di bawah ini :

Gambar3.4 Presentase Anak usia 0-17 tahun yang memiliki Akte Kelahiran di Kota Bukittinggi



Sumber :SusenasMaret 2015.

F. Komposisi penduduk menurut Status Perkawinan

Menurut Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974, perkawinan adalah suatu ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara tidak langsung status perkawinan akan mempengaruhi tingkat kelahiran. Umumnya suatu daerah dengan proporsi kawin yang tinggi cenderung menaikkan angka kelahiran.

Tabel 3.4. Persentase Penduduk 10 tahun keatas menurut Status Perkawinan Tahun 2017

Status Perkawinan	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	L+P (%)
Belum Kawin	42.09	37.54	39.72
Kawin	55.65	52.35	53.93
Cerai Hidup	1.65	3.18	2.44
Cerai Mati	0.61	6.93	3.91
Jumlah	100	100	100

Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2017

G. Kepala Keluarga Perempuan

Kepala Keluarga tidak hanya berjenis kelamin laki-laki saja tetapi perempuan pun ada yang berperan sebagai kepala keluarga. Peran kepala keluarga sangatlah besar dalam mengambil keputusan dalam sebuah keluarga, seperti memilihkan pendidikan untuk anak-anak, menjaga kesehatan keluarga, sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan suatu daerah.

Dibawah ini memperlihatkan persentase Kepala rumah tangga menurut kecamatan dan jenis kelamin tahun 2017.

Tabel 3.5. Persentase Kepala rumah tangga menurut kecamatan dan jenis kelamin Kota Bukittinggi tahun 2017.

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	KK Laki-laki		KK Perempuan	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Mandiingin Koto Selayan	10.481	8735	83,34	1746	16,66
2	Guguk Panjang	8.031	6454	80,36	1577	19,63
3	Aur Birugo Tigo Baleh	4.906	4156	84,71	750	15,29
	Kota Bukittinggi	23.418	19345	82,6	4073	17,39

Tabel diatas menggambarkan bahwa terdapat 4073 orang atau 17,39 % kepala keluarga di Kota Bukittinggi adalah perempuan, hal ini berarti perempuan haruslah memiliki kemampuan baik secara ekonomi, moral dan spiritual untuk menjadi pengambil keputusan di rumah tangganya.

BAB IV DATA GENDER BIDANG PENDIDIKAN

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. SDM yang berkualitas salah satunya dapat diukur dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pendidikan formal dititikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi. Demikian juga peningkatan ketersediaan informasi pendidikan, pengembangan budaya baca, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, khususnya bagi perempuan dan anak. Sementara pendidikan non formal bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat dalam mencapai program wajib belajar 9 tahun.

Indikator pendidikan seperti angka melek huruf, status pendidikan, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi perempuan dan anak. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata sekolah bagi perempuan akan berdampak kepada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan bangsa. Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas yang baik tanpa membedakan anak laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan penduduk laki-laki akan sangat potensial apabila diberdaya gunakan. Tanpa mengenyampingkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan yang bertanggung jawab terhadap keluarga, maka peran perempuan untuk menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak-anak. Ibu yang berpendidikan diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas.

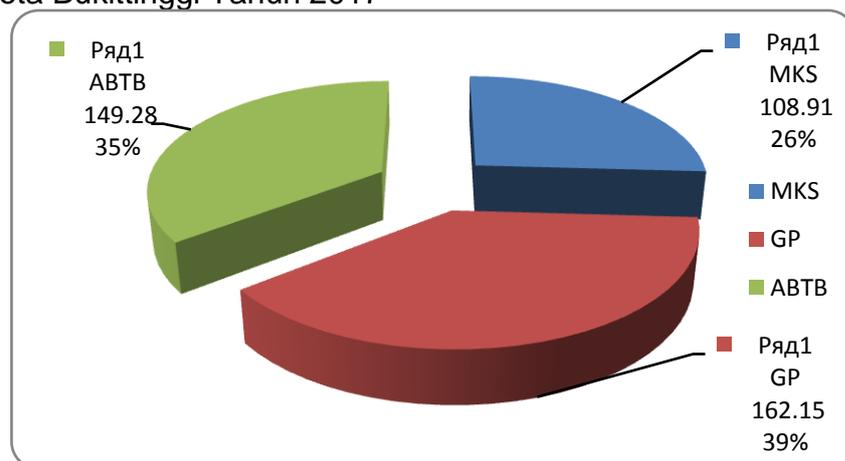
Bagaimana peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan serta sampai seberapa jauh pendidikan telah diakses oleh perempuan akan diulas pada bab ini. Data dan informasi yang dihasilkan diharapkan akan dapat mengidentifikasi sebagian besar profil perempuan dan anak di bidang pendidikan dalam membantu pengambil keputusan untuk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

A. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut,

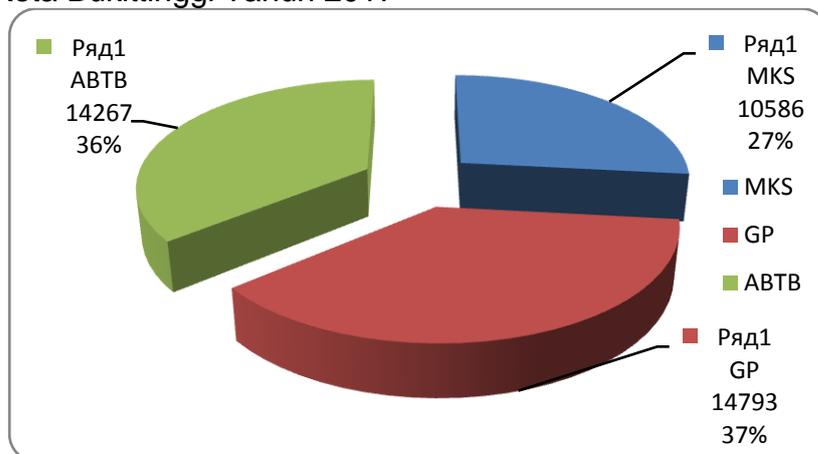
Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan.

Gambar 4.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa SD Laki-laki per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017



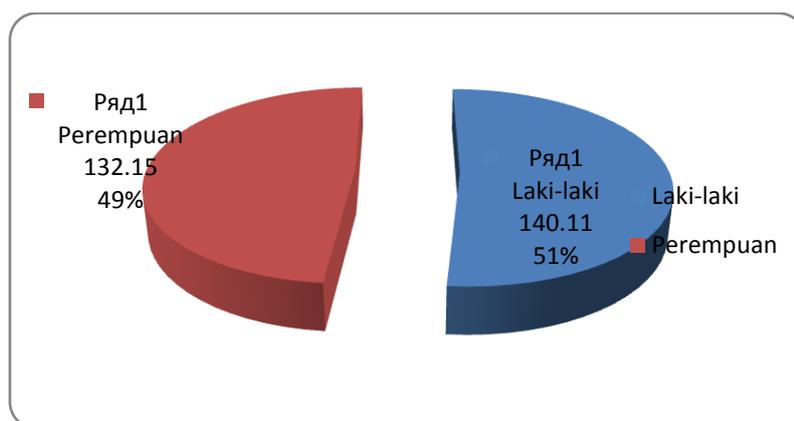
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2017

Gambar 4.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa SD Perempuan per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2017

Gambar 4.3 APK Siswa SD menurut jenis Kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2017



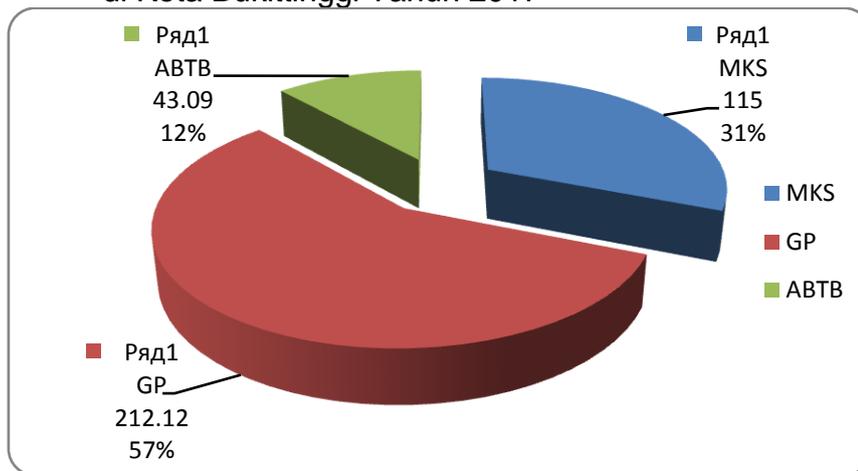
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2017

Dari gambar di atas terlihat bahwa APK siswa SD laki-laki maupun perempuan sudah melebihi nilai 100%, yaitu 132,15% pada perempuan dan 140,11 % pada laki-laki. Hal ini mengindikasikan populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar mencakup anak diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibandingkan usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah . Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah diusia yang lebih muda. Faktor lain yang

menyebabkan APK elebihi 100% adalah adanya siswa yang berasal dari luar Kota Bukittinggi yang bersekolah di Bukittinggi.

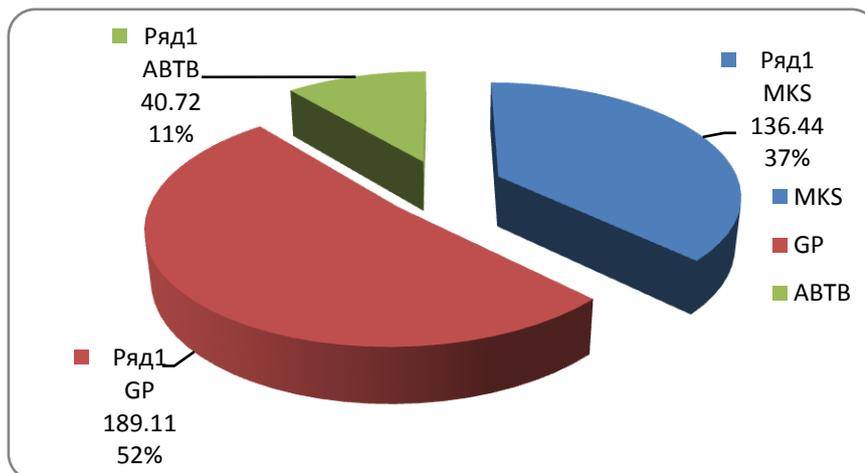
APK pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. APK perempuan dan APK laki-laki pada pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa SMP Laki-laki per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017



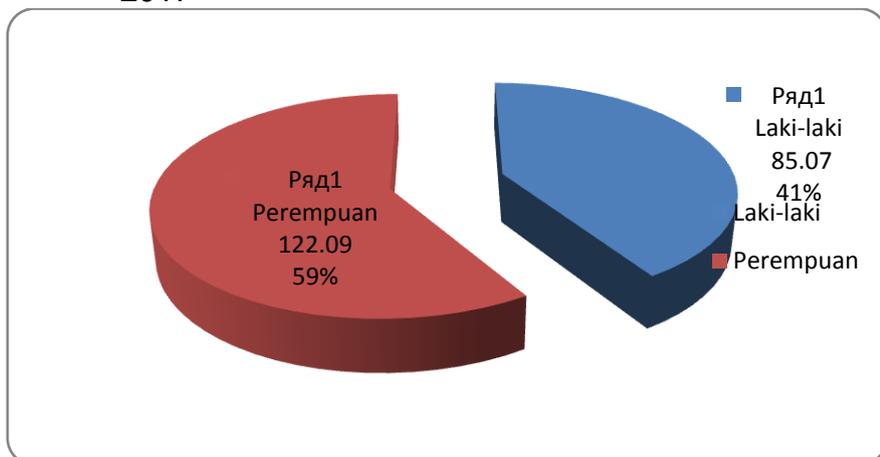
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2017

Gambar 4.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa SD Perempuan per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2017

Gambar 4.6 APK Siswa SLTP menurut jenis Kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2017

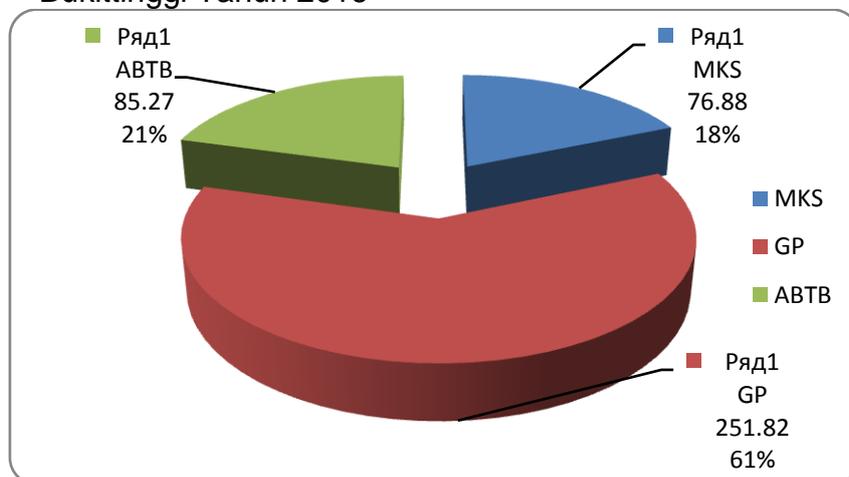


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2017

Gambar di atas menunjukkan APK siswa SLTP laki-laki adalah 85.07% lebih kecil dibanding dengan APK siswa SLTP perempuan.

APK Siswa SLTA dapat dilihat pada gambar berikut :

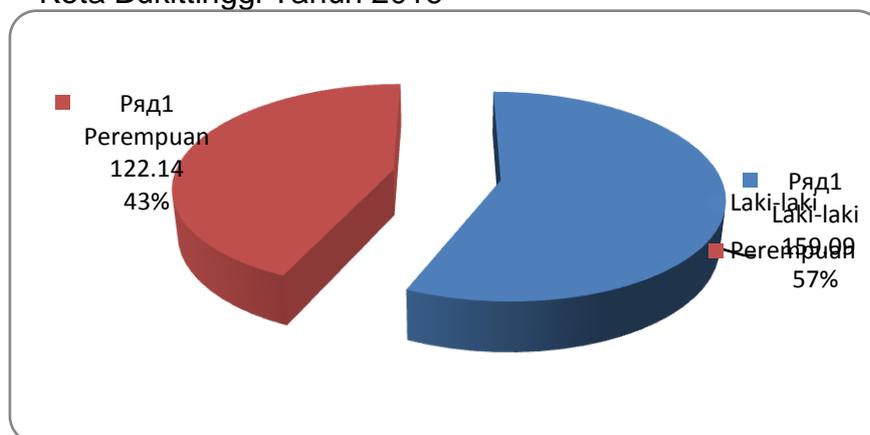
Gambar 4.7 Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa SLTA per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2016



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2017

Berdasarkan jenis kelamin, APK Siswa SLTA dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.8 Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa SLTA per Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2016



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2017

Pada gambar di atas terlihat bahwa APK siswa SLTA Laki-laki dan perempuan lebih dari 100%, akan tetapi terlihat bahwa APK siswa SLTA laki-laki lebih besar dari pada siswa perempuan.

Salah satu penyebab tingginya APK tingkat jenjang pendidikan SLTA di Kota Bukittinggi adalah karena peminatan dan daya tampung pendidikan jenjang SLTA di Kota Bukittinggi lebih besar, sebab Bukittinggi merupakan kota pendidikan yang memiliki fasilitas pendidikan dan mutu yang cukup baik di Sumatera Barat.

B. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu (7 sampai dengan 18 tahun) yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan

yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Tabel berikut menunjukkan Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA dan jenis kelamin per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2016

Tabel 4.1. Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA dan jenis kelamin per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2016

No	Kecamatan	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Mandiangan Koto Selayan	81.78	82.51	82.14	31.38	34.1	32.74	57.72	68.813	60.96
2	Guguk Panjang	144.4	138.7	141.56	159.84	156.81	158.27	185.93	174.25	179.6
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	132.4	130.1	131.29	24.5	25.13	24.843	80.579	55.31	65.10
	Kota Bukittinggi			118.33			71.953			101.9

; Dinas Dikbud Kota Bukittinggi Tahun 2017

Tabel 4.2. Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan SD dan SLTP dan jenis kelamin per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017

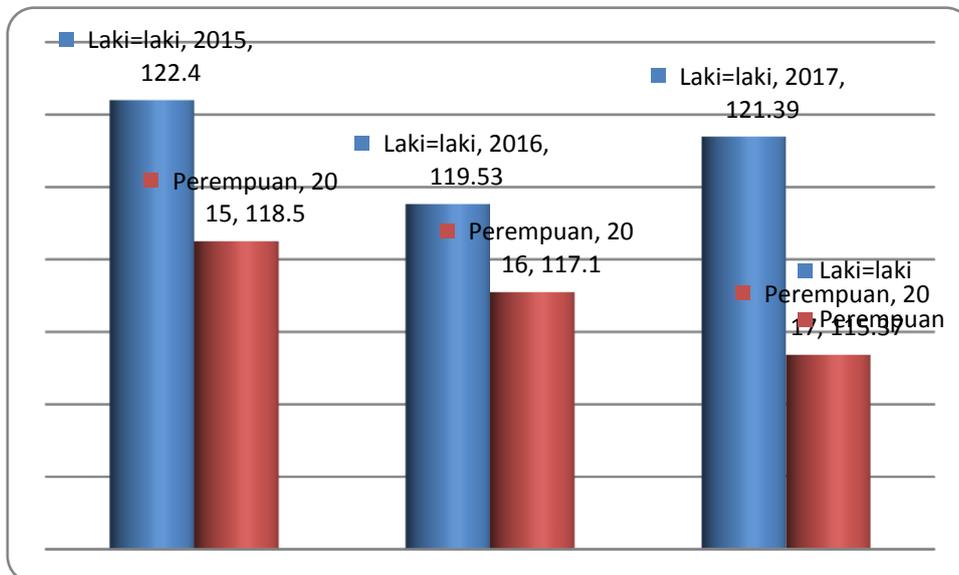
No	Kecamatan	SD			SLTP		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Mandiangan Koto Selayan	93.146	92.135	92.653	36.406	33.613	35.006
2	Guguk Panjang	142.76	131.15	136.99	168.14	153.35	160.49
3.	Aur Birugo Tigi Baleh	128.26	122.82	125.6	29.742	29.141	29.412
	Kota Bukittinggi			118.41			74.971

Sumber ; Dinas Dikbud Kota Bukittinggi Tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa APM siswa SD laki-laki dan perempuan adalah hampir sama laki-laki dan perempuan

Bila dibandingkan antara tahun 2015, 2016 dan tahun 2017, terlihat penurunan APM siswa SD perempuan dari 118.5 tahun 2015 menurun menjadi 117,1 tahun 2016 dan menjadi 115,37 tahun 2017, sedangkan APM siswa SD laki-laki menurun dari 122.4 tahun 2015 , menurunmenjadi 119,53 tahun 2016 dan meningkat menjadi 121,39 tahun 2017 seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

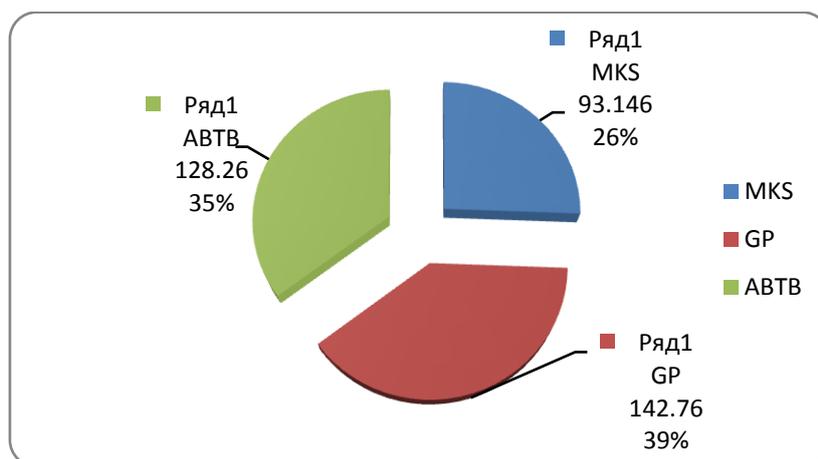
Gambar 4.9 Perbandingan APM siswa SD Tahun 2015, 2016 dan 2017 berdasarkan jenis kelamin Kota Bukittinggi .



Sumber; Dinas Dikbud Kota Bukittinggi Tahun 2017

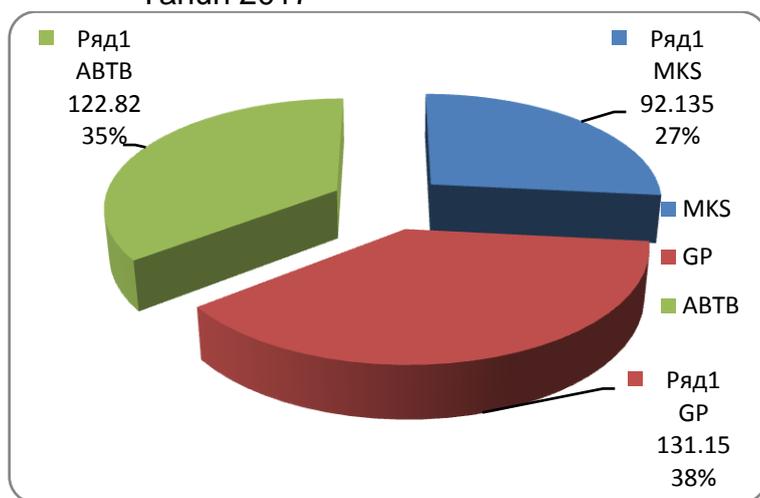
Bila dilihat berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin, APM Siswa dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.10 APM Siswa SD Laki-laki Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017



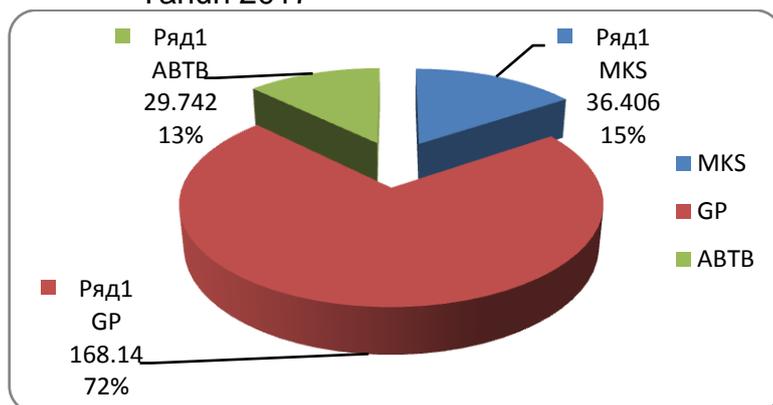
Sumber ; Dinas Dikbud Kota Bukittinggi Tahun 2017

Gambar 4.11 APM Siswa SD Perempuan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017



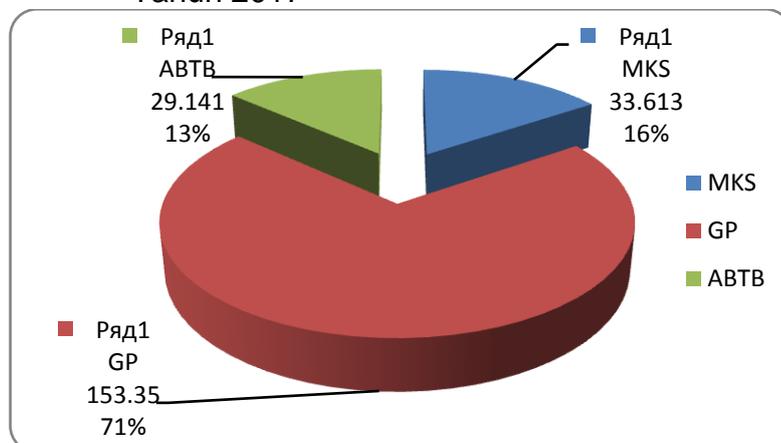
Sumber ; Dinas Dikbud Kota Bukittinggi Tahun 2017

Gambar 4.12 APM Siswa SLTP Laki-laki Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017



Sumber ; Dinas Dikbud Kota Bukittinggi Tahun 2017

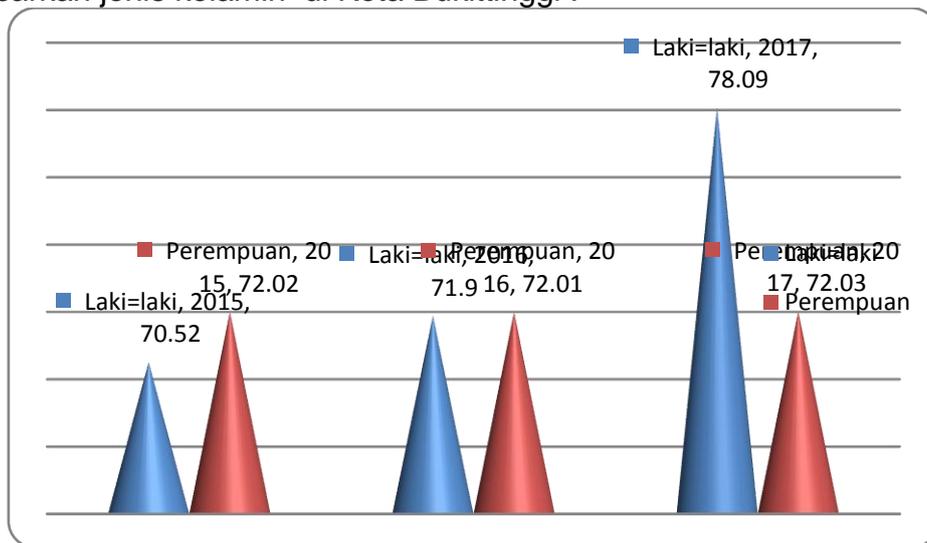
Gambar 4.13 APM Siswa SLTP Perempuan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017



Sumber ; Dinas Dikbud Kota Bukittinggi Tahun 2017

Bila dibandingkan antara tahun 2015, 2016 dan tahun 2017, terlihat peningkatan dan penurunan APM siswa SLTP seperti pada pada tabel dibawah ini.

Gambar 4.14 Perbandingan APM siswa SLTP Tahun 2015,2016 dan 2017 berdasarkan jenis kelamin di Kota Bukittinggi .



Sumber ; Dinas Dikbud Kota Bukittinggi Tahun 2017

Dari gambar di atas terlihat bahwa APM siswa SLTP Perempuan hampir sama disetiap tahunnya, akan tetapi terjadi peningkatan APM siswa SLTP laki-laki pada tahun 2017.

C. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Naum demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Di bawah ini digambarkan Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur (7-12,13-15 dan 16-18 tahun) dan Jenis kelamin per kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2017.

Tabel 4.3 Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur (7-12,13-15 dan 16-18 tahun) dan Jenis kelamin per kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2017

No	Kecamatan	7-12			13-15			16-18		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Mandiingin Koto Selayan	100	98.91	99.46	96.85	100	98.53	83.65	94.06	88.59
2	Guguk Panjang	100	98.91	99.46	96.85	100	98.53	83.65	94.06	88.59
3.	Aur Birugo Tigi Baleh	100	98.91	99.46	96.85	100	98.53	83.65	94.06	88.59
	Kota Bukittinggi	100	98.91	99.46	96.85	100	98.53	83.65	94.06	88.59

Sumber ; Dinas Dikbud Kota Bukittinggi Tahun 2017

Tabel di atas, memperlihatkan bahwa perempuan memiliki APS sedikit lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang berarti kesempatan perempuan untuk mengakses pendidikan telah menambah angka partisipasi wanita dalam pendidikan. Konsekuensinya terhadap perencanaan pembangunan yang harus dilakukan pemerintah adalah menyediakan lapangan kerja bagi penduduk perempuan.

Persentase Penduduk Usia 5 tahun keatas menurut jenis kelamin dan partisipasi Sekolah di Kota Bukittinggi Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel. 4.4 Persentase Penduduk Usia 5 tahun keatas menurut jenis kelamin dan partisipasi Sekolah di Kota Bukittinggi Tahun 2017

No	Partisipasi Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	L+P
1	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	4,2	3,55	3.86
2	Masih Sekolah	28,53	31,53	30,09
3	Tidak bersekolah lagi	67,27	64,92	66,05
	Total	100	100	100

Sumber : Susenas BPS Kota Bukittinggi Tahun 2017.

Secara umum penduduk di Kota Bukittinggi telah menikmati pendidikan, hanya 3.86 % penduduk Bukittinggi yang tidak / belum pernah sekolah,

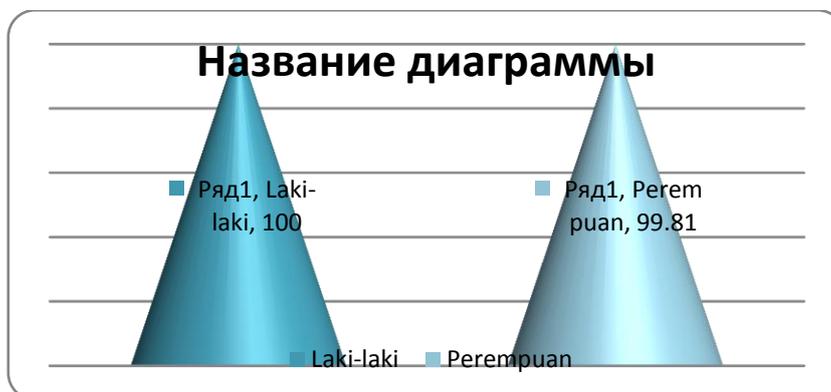
sedangkan penduduk yang masih sekolah terdapat sedikit perbedaan , yang dapat diindikasikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama sudah dapat kesempatan menikmati fasilitas pendidikan.

D. Melek Huruf dan Buta Huruf

Melek Huruf didefinisikan sebagai kemampuan membaca dan menulis. Indikator ini menggambarkan mutu sumber daya manusia yang diukur dalam aspek pendidikan . Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik mutu sumber daya manusia dalam masyarakat. Kemampuan membaca dan menulis (baca tulis) merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan penduduk untuk menuju hidup sejahtera.

Persentase penduduk Kota Bukittinggi berumur 15 tahun keatas yang melek huruf menurut jenis kelamin tahun 2017 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.15 Persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang melek huruf menurut jenis kelamin di Kota Bukittinggi tahun 2017



Sumber : Susenas 2017, BPS

Dari gambar diatas terlihat bahwa hampir seluruh penduduk Kota Bukittinggi sudah bisa baca tulis hanya 0,19% penduduk perempuan yang masih buta huruf. Hal ini menunjukkan pencapaian pendidikan dasar yang efektif dan berhasilnya program keaksaraan

E. Angka Putus Sekolah

Tabel 4.5 .Angka Putus Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017

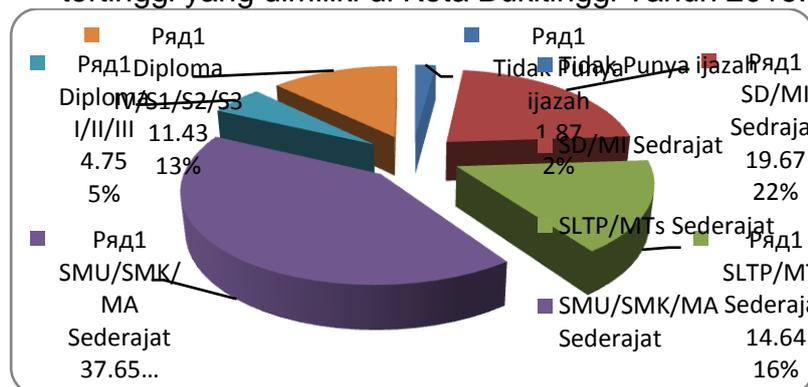
No	Kecamatan	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Mandiingin Koto Selayan	2	1	3	9	9	18	0	0	0
2	Guguk Panjang	0	0	0	5	1	6	0	0	0
3.	Aur Birugo Tigi Baleh	0	00	0	0	0	0	0	0	0
	Kota Bukittinggi			0.02			0,24			0

F. Penduduk menurut jenis pendidikan tertinggi

Gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan akan semakin baik kualitas penduduknya sehingga dapat menggambarkan tingkat kemajuan suatu negara.

Pada gambar 4.16 dapat dilihat bahwa penduduk berumur 10 tahun keatas menurut ijazah tertinggi yang dimiliki di Kota Bukittinggi Tahun 2016.

Gambar 4.16. Persentase penduduk berumur 10 tahun keatas menurut ijazah tertinggi yang dimiliki di Kota Bukittinggi Tahun 2016.



Sumber : Susenas 2016,BPS

Dari gambar di atas terlihat bahwa pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk umur 10 tahun keatas terbanyak adalah sampai sekolah menengah umum.

G. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki.

Ijazah / STTB tertinggi yang dimiliki seseorang merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formalnya. Semakin tinggi ijazah yang dimiliki rata-rata penduduk suatu negara semakin tinggi taraf intelegualitas negara tersebut.

Keberhasilan program pembangunan pendidikan dapat dilihat dari pendidikan yang ditamatkan sebagian besar penduduk. Berdasarkan data susenas pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun keatas adalah SLTA ke bawah dengan presentase mencapai 80.97 persen.

Tabel 4.6 Persentase pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Penduduk Umur 15 Tahun Keatas menurut Jenis Kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2017

Pendidikan Tertinggi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Tidak Punya Ijazah	5.48	3.85	4.63
SD Sederajat	13.59	11.91	12.71
SLTP sederajat	19.29	18.52	18.89
SLTA sederajat	46.08	43.51	44.74
Diploma I/II	0.83	1.55	1.21
Diploma III/ Akademi	3.63	6.52	5.14
Diploma IV/S1	9.47	13.23	11.43
S2	1.50	0.91	1.19
S3	0.13	0	0.06
	100	100	100

Sumber : Susenas BPS

Jika dibandingkan antara laki-laki dan perempuan terlihat bahwa pendidikan laki-laki relatif lebih baik dibandingkan dengan pendidikan perempuan pada jenjang pendidikan SLTA ke bawah, Sedangkan untuk pendidikan DIII/Akademi dan S1/ Diploma IV lebih banyak pada perempuan

H. Sertifikasi guru

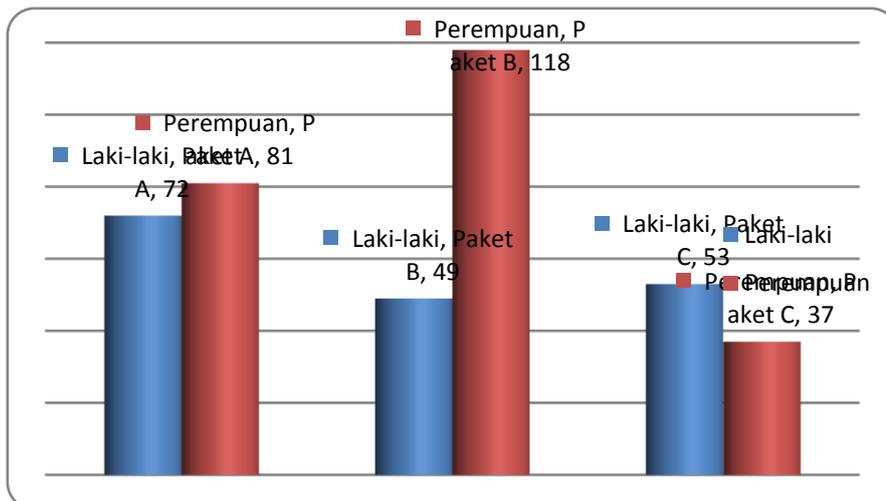
Gambar 4.17. Jumlah guru Negeri yang telah sertifikasi menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2015- 2017.



Gambar di atas memperlihatkan bahwa guru sertifikasi banyak diterima oleh guru SD, apabila dibandingkan dengan data guru yang ada di Kota Bukittinggi, maka penerima sertifikasi lebih banyak perempuan karena jumlah guru perempuan lebih banyak dari laki-laki.

I. Angka Kelulusan Paket A, B dan C

Gambar 4. 18 Jumlah Angka Kelulusan Paket A,B dan C berdasarkan Jenis Kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2017



J. Sekolah Luar Biasa (SLB)

Tabel 4.19 Jumlah SLB Negeri dan Swasta per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017

No	Kecamatan	SLB Negeri					SLB Swasta				
		TK	SD	SLTP	SLTA	Jml	TK	SD	SLTP	SLTA	Jml
1	Mandiingin Koto Selayan					1		1	1		3
2	Guguk Panjang							2			2
3.	Aur Birugo Tigi Baleh							2			2
	Kota Bukittinggi					1					7

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2017.

BAB V DATA BIDANG KESEHATAN

Pembangunan Kesehatan merupakan salah satu dari upaya pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan perempuan dan anak melalui pelayanan kesehatan yang bermutu dan menjangkau setiap lapisan masyarakat. Pembangunan kesehatan diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tingginya disparitas dan perlunya percepatan peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan menuntut adanya dukungan sumber daya yang cukup serta arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat. Dukungan data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat, dan cepat dalam pengelolaan pembangunan kesehatan menjadi penting.

Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Nasional, maka pembangunan di Kota Bukittinggi khususnya pembangunan kesehatan telah diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif yang dipadukan secara seimbang dengan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Terkait dengan itu, pelayanan kesehatan perempuan dan anak-anak dapat dilihat dari beberapa layanan yang diberikan, diantaranya layanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan, layanan kesehatan terhadap pengidap HIV/AIDS, pelayanan keluarga berencana dan sebagainya.

A. PELAYANAN KESEHATAN IBU

1. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

Angka kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita

yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per100.000 kelahiran hidup.

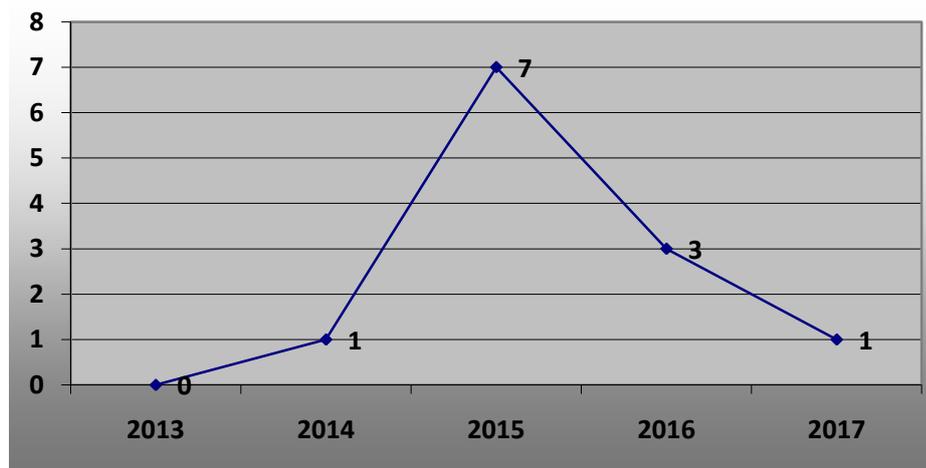
Kematian ibu adalah kematian seorang wanita yang dikarenakan oleh kehamilan, persalinan, dan masa nifasnya. Angka kematian Ibu mencerminkan resiko yang dihadapi ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh

- a. Keadaan sosial ekonomi dan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan.
- b. Kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran.
- c. Tingkat tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetri.

AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan.

Pada Gambar 5.1 berikut terlihat kecenderungan jumlah kematian ibu maternal sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 di Kota Bukittinggi.

Gambar 5.1
JUMLAH KEMATIAN IBU
DI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013-2017



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2018

Jumlah kematian ibu maternal di Kota Bukittinggi tahun 2017 adalah 1 jiwa. Kasus ini terjadi di wilayah Kecamatan Guguk Panjang. Angka ini mengalami penurunan yang dramatis dibandingkan dengan tahun 2015 dari 7 jiwa. Selain menegakkan AMP ditingkat kota, seperti halnya kematian bayi, peran promosi kesehatan melalui program P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) serta program Desa Siaga dalam menjalankan fungsinya meningkatkan sistem siaga di masyarakat terhadap kesehatan ibu hamil di wilayahnya menjadi upaya dalam menurunkan kematian ibu. Selain itu, bidang promosi kesehatan sebagai fungsi promotif dan preventif melalui penyuluhan dengan menggunakan media media yang efektif dan menarik dapat meningkatkan pengetahuan kesehatan ibu dan anak.

2. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Linakes) dengan Kompetensi Kebidanan

Periode persalinan merupakan salah satu periode yang berkontribusi besar terhadap Angka Kematian Ibu di Indonesia. Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa sekitar persalinan, hal ini disebabkan antara lain pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional).

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan yang bertujuan untuk mengamankan proses persalinan oleh tenaga kesehatan.

Tabel 5.1 Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (Linakes) Per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2017

No	Kecamatan	Linakes		
		Sasaran	Absolut	%
1	Mandiingin Koto Selayan	1099	1073	97,6
2	Guguk Panjang	1010	815	80,7
3	Aur Birugo Tigo Baleh	605	550	90,9
	Kota Bukittinggi	2714	2438	89,8

Sumber: Dinas Kesehatan Th 2017

3. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Ante Natal Care)

Hasil pencapaian upaya kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator Cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun.

Sedangkan Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan, dibandingkan sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.

Cakupan pelayanan antenatal (K1 dan K4) di Kota Bukittinggi tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2 Cakupan Pelayanan Ante Natal Care Per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2017

No	Kecamatan	Sasaran	K1		K4		Bumil Resti	
			JML	%	JML	%	JML	Dapat Yankes
1	Mandiingin Koto Selayan	1152	1152	100	1093	94,87	230	218
2	Guguk Panjang	1058	946	89,4	910	86,01	212	191
3	Aur Birugo Tigo Baleh	633	585	92,4	569	89,89	127	91
	KotaBukittinggi	2843	2683	94,4	2572	90,46	569	500

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2017

Dari table diatas terlihat bahwa seluruh ibu hamil di wilayah Kota Bukittinggi 94,4 % sudah mendapatkan pelayanan antenatal pertama kali, sedangkan persentase ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan hanya 90,46%.

B. PELAYANAN KESEHATAN ANAK

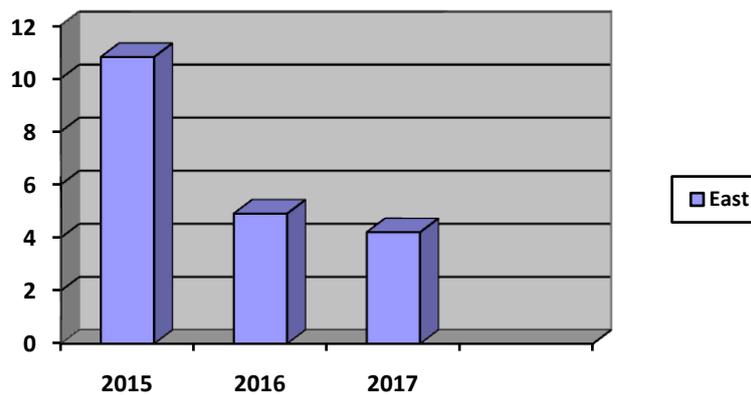
1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi (AKB) atau infant mortality rate (IMR) merupakan salah satu indikator sangat sensitif untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat. AKB merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan AKB.

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Jumlah Kematian Bayi di Kota Bukittinggi tahun 2017 adalah sebanyak 7 kasus, atau Angka Kematian Bayi sebesar 4,2/ 1.000 kelahiran hidup. Angka ini mengalami penurunan yang positif (kematian bayi mengalami penurunan) dibandingkan tahun 2015 dan 2016 lalu yaitu sebesar 10,8/1.000 kelahiran hidup tahun 2015, dan 4,9/1000 kelahiran hidup tahun 2016. Grafik perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Bukittinggi dalam 3 tahun terakhir dapat di lihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 5.2.
Angka kematian bayi (akb) per 1000 kelahiran hidup
Di kota bukittinggi tahun 2015-2017



Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2017.

Bila dilihat jumlah kasus yang terjadi tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3 Jumlah Kematian Bayi Per Kecamatan per Jenis Kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2017

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Mandiingin Koto Selayan	1	0	1
2	Guguk Panjang	2	2	4
3	Aur Birugo Tigo Baleh	2	0	2
	Kota Bukittinggi	5	2	7

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2017.

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah kematian bayi laki-laki lebih banyak dari bayi perempuan.

2. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Anak Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak umur 12-59 bulan per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu tertentu. AKABA dapat menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan serta factor lain yang mempengaruhi terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi lingkungan, tingkat pelayanan KIA / Posyandu, penyakit infeksi, dan kecelakaan.

Kematian anak balita di Kota Bukittinggi Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.4 Jumlah Kematian Anak Balita Per Kecamatan per Jenis Kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2017

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Mandiingin Koto Selayan	0	0	0
2	Guguk Panjang	2	2	4
3	Aur Birugo Tigo Baleh	0	0	0
	Kota Bukittinggi	2	2	4

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2017

Tabel diatas memperlihatkan bahwa kematian anak balita laki-laki dan perempuan adalah sama.

3. Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif (0-6 bulan)

Cara Pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan dan meneruskan menyusui anak sampai umur 24 bulan. Mulai umur 6 bulan, bayi mendapat makanan pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya.

ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi yang mengandung sel darah putih, protein dan zat kekebalan yang cocok untuk bayi. ASI membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal serta melindungi terhadap penyakit.

Tabel berikut ini menyajikan persentase kecendrungan cakupan anak usia 0 – 6 bulan yang mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif tahun 2017 di Kota Bukittinggi.

Tabel 5.5 Cakupan Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017

No	Kecamatan	Total Bayi (0-6 bln)		Bayi 0-6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif			
				Laki-Laki		Perempuan	
		Laki	Perem Puan	Jml	%	Jml	%

1	Mandiingin Koto Selayan	225	221	168	74,6	164	74,2
2	Guguk Panjang	205	207	62	30,2	76	36,7
3	Aur Birugo Tigo Baleh	119	126	101	84,8	71	56,3
	Kota Bukittinggi	549	554	321	58,4	311	56,1

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2017

Data pada tabel diatas menggambarkan bahwa pemberian ASI Eksklusif kepada bayi 0-6 bulan masih rendah, hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor ;

- Gencarnya promosi susu formula untuk bayi 0-6 bulan yang tidak ada masalah medis
- Masih adanya tenaga kesehatan yang tidak berpihak terhadap hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif dan mendorong untuk menggunakan susu formula pada bayi 0-6 bulan.
- Pemasaran susu formula masih banyak yang ditujukan pada bayi yang tidak punya masalah kesehatan.
- Masih sangat terbatasnya tenaga konselor ASI
- Belum maksimalnya kegiatan edukasi, sosialisasi, advokasi, dan kampanye terkait pemberian ASI,
- Belum semua rumah sakit melaksanakan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM)

Apabila dilihat dari jenis kelamin terlihat bahwa hamper sama cakupan bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif antara laki-lak dan perempuan.

4. Pelayanan Kesehatan Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Berat Badan Lahir Rendah didefinisikan sebagai bayi lahir yang berat badannya kurang dari 2500 gram. Bayi yang mempunyai berat badan lahir rendah sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kecerdasan anak, cenderung mempunyai pertumbuhan fisik yang terhambat. Selain itu mudah terkena infeksi. Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah Kota Bukittinggi tahun 2017 adalah 1.44%, dimana ditemukan 35 bayi dengan berat badan lahir <2500 gram

dari 2.427 bayi yang lahir. Adapun cakupan BBLR pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.6 Cakupan BBLR yang mendapat Pelayanan Kesehatan per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017

No	Kecamatan	Bayi BBLR					
		Laki-laki			Perempuan		
		Jml	Dapat Yankes	%	Jml	Dapat Yankes	%
1	Mandiingin Koto Selayan	6	6	100	5	5	100
2	Guguk Panjang	2	2	100	5	5	100
3	Aur Birugo Tigo Baleh	8	8	100	9	9	100
	Kota Bukittinggi	16	16	100	19	19	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa semua bayi BBLR perempuan dan laki-laki sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

5. Cakupan kunjungan Bayi

Bayi juga merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap gangguan kesehatan maupun serangan penyakit. Oleh karena itu dilakukan upaya pelayanan kesehatan yang ditujukan pada bayi usia 29 hari sampai dengan 11 bulan dengan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis kesehatan (dokter, bidan, dan perawat) minimal 4 kali. Program ini terdiri dari pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/ HB1-3, Polio 1-4, dan Campak), Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) bayi, 2 kali pemberian vitamin A pada bayi, dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi serta penyuluhan ASI Eksklusif, MP ASI, pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita dan lain-lain.

Cakupan pelayanan kesehatan bayi dapat menggambarkan upaya pemerintah dalam meningkatkan akses bayi untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin adanya kelainan atau penyakit, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit serta peningkatan kualitas hidup bayi.

Cakupan kunjungan bayi per kecamatan di Kota Bukittinggi pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.7 Cakupan Kunjungan Bayi ke Pelayanan Kesehatan per Kecamatan Di Kota Bukittinggi Tahun 2017.

No	Kecamatan	SASARAN		CAKUPAN KUNJUNGAN BAYI			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
				JML	%	JML	%
1	Mandiingin Koto Selayan	563	554	579	102.8	521	94.0
2	Guguk Panjang	511	516	476	93.2	392	76.0
3	Aur Birugo Tigo Baleh	298	316	278	93.3	252	79.7
	Kota Bukittinggi	1372	1386	1333	97.2	1165	84.1

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2017

6. Cakupan Kunjungan Anak Balita

Salah satu indikator yang ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan terkait dengan upaya kesehatan anak adalah pelayanan kesehatan pada anak balita. Adapun batasan anak balita adalah setiap anak yang berada pada kisaran umur 12 sampai dengan 59 bulan.;

Pelayanan kesehatan pada anak balita dilakukan oleh tenaga kesehatan dan memperoleh :

1. Pelayanan Pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun (Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan minimal 8 kali dalam setahun).
2. Pemberian vitamin A dua kali dalam setahun yakni setiap bulan Februari dan Agustus.
3. Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang balita minimal 2 kali dalam setahun.

4. Pelayanan Anak Balita Sakit sesuai standar menggunakan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

Cakupan kunjungan anak balita ke pelayanan kesehatan di Kota Bukittinggi selama tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.8 Cakupan kunjungan anak balita ke pelayanan kesehatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017

No	Kecamatan	SASARAN		CAKUPAN KUNJUNGAN ANAK BALITA			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
				JML	%	JML	%
1	Mandiingin Koto Selayan	1790	1811	1427	79.72	1430	78.96
2	Guguk Panjang	1876	1808	965	51.44	1026	56.75
3	Aur Birugo Tigo Baleh	1120	1120	665	59.38	706	63.04
	Kota Bukittinggi	4786	4739	3057	63.87	3162	66.72

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2017

Tabel di atas menggambarkan bahwa kunjungan anak balita masih rendah baik laki-laki ataupun perempuan, hal ini berarti masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran orang tua untuk membawa anaknya ke pelayanan kesehatan baik dalam keadaan sehat ataupun sakit.

Rendahnya kunjungan ini akan berakibat terhadap tidak dapat dipantaunya tumbuh kembang si anak, sehingga apabila terdapat permasalahan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya , anak tidak dapat dideteksi dan diintervensi sedini mungkin.

7. Pelayanan Imunisasi lengkap pada bayi 0-11 bulan

Program imunisasi di Kota Bukittinggi merupakan bentuk pencegahan penyakit dan perlindungan terhadap penyakit dengan memberikan vaksin pada sasaran imunisasi. Program imunisasi ini dilakukan oleh petugas puskesmas, tidak hanya menunggu di puskesmas akan tetapi mencari dan melaksanakan imunisasi di luar puskesmas seperti posyandu dan pos-pos pelayanan kelurahan

lainnya, serta dengan pengembangan program pada bidan-bidan praktek swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh terhadap masyarakat.

a. Imunisasi Hb 0

(Hepatitis B pertama) diberikan secara suntik pada paha atas. Imunisasi ini bermanfaat untuk mencegah infeksi Hepatitis B pada bayi. Imunisasi HB 0 harus diberikan kepada bayi umur 0-7 hari.

Selama Tahun 2017, cakupan bayi yang mendapatkan imunisasi HB 0 sudah melebihi target sasaran, hal ini dikarenakan adanya bayi yang berasal dari luar kota Bukittinggi. Seperti dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.9 Cakupan Imunisasi HB 0 per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2017

No	Kecamatan	SASARAN		Jumlah Bayi mendapatkan Imunisasi HB 0			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
				JML	%	JML	%
1	Mandiingin Koto Selayan	556	514	535	96.22	545	106.03
2	Guguk Panjang	422	387	451	106.87	462	119.38
3	Aur Birugo Tigo Baleh	241	307	275	114.11	275	89.58
	Kota Bukittinggi	1219	1208	1261	103.45	1282	106.13

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2017

b. Imunisasi BCG,

Imunisasi BCG diberikan untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh bayi terhadap penyakit tuberculosis (TBC). Imunisasi TBC diberikan kepada bayi mulai dari usia 1 bulan dan sebelum usia 3 bulan, Imunisasi diberikan secara disuntik di bawah kulit pada lengan kanan atas. Tanda bahwa BCG berhasil adalah munculnya bisul kecil di daerah bekas suntikan dalam waktu 2-4 minggu

kemudian menjadi bernanah dan akan sembuh sendiri dalam waktu 2-5 bulan dengan meninggalkan bekas luka. Selama tahun 2017, jumlah cakupan immunisasi BCG adalah sebanyak 1244 orang untuk bayi perempuan dan 1281 orang untuk bayi perempuan, seperti tabel berikut :

Tabel 5.10 Cakupan Immunisasi BCG per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2017

No	Kecamatan	SASARAN		Jumlah Bayi mendapatkan Immunisasi BCG			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
				JML	%	JML	%
1	Mandiingin Koto Selayan	556	514	542	97.5	535	104
2	Guguk Panjang	422	387	452	107	432	150,5
3	Aur Birugo Tigo Baleh	241	307	285	118	277	90.2
	Kota Bukittinggi	1219	1208	1281	105	1244	103

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2017

c. Immunisasi DPT-HB3/DPT-HB-Hib3,

Immunisasi DPT-HB3/DPT-HB-Hib3 adalah vaksin yang digunakan untuk pencegahan terhadap difteri, tetanus, pertusis, hepatitis B dan haemophilus influenza tipe B. Diberikan dengan cara disuntikkan ke paha atas bayi dan diberikan sebanyak 3 kali dimulai dari usia 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan.

Tabel 5.10 Cakupan Immunisasi DPT-HB3/DPT-HB-Hib3 per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2017

No	Kecamatan	SASARAN		Jumlah Bayi mendapatkan Immunisasi DPT-HB3/DPT-HB-Hib3			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
				JML	%	JML	%
1	Mandiingin Koto Selayan	563	554	530	94.14	510	92.06

2	Guguk Panjang	511	516	444	86.89	467	90.50
3	Aur Birugo Tigo Baleh	298	316	280	93.96	263	83.23
	Kota Bukittinggi	1372	1386	1254	91.40	1240	89.47

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2017

Pemberian imunisasi DPT-HB3/DPT-HB-Hib3 selama tahun 2017 telah diberikan kepada 91,4 % pada bayi laki-laki dan 89,47 % pada bayi perempuan.

d. Imunisasi Polio

Imunisasi Polio diberikan kepada bayi untuk mencegah penyakit polio, pemberiannya dimulai sejak usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan bersamaan dengan pemberian imunisasi DPT, sedangkan caranya adalah dengan diteteskan di mulut bayi.

Tabel 5.11 Cakupan Imunisasi Polio per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2017

No	Kecamatan	SASARAN		Jumlah Bayi mendapatkan Imunisasi Polio			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
				JML	%	JML	%
1	Mandiingin Koto Selayan	563	554	516	91.65	527	95.13
2	Guguk Panjang	511	516	441	86.30	479	92.83
3	Aur Birugo Tigo Baleh	298	316	280	93.96	262	82.91
	Kota Bukittinggi	1372	1386	1,237	90.16	1,268	91.49

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2017

Selama tahun 2017 telah diberikan kepada 90,16% bayi laki-laki dan 91,49 % pada bayi perempuan.

e. Imunisasi Campak

Imunisasi campak diberikan untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak, diberikan kepada bayi yang berusia 9 bulan dengan cara disuntik pada lengan atas sebelah kiri.

Tabel 5.12 Cakupan Immunisasi Campak per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2017

No	Kecamatan	SASARAN		Jumlah Bayi mendapatkan Immunisasi Campak			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
				JML	%	JML	%
1	Mandiingin Koto Selayan	563	554	536	95.20	514	92.78
2	Guguk Panjang	511	516	436	85.32	476	92.25
3	Aur Birugo Tigo Baleh	298	316	297	99.66	252	79.75
	Kota Bukittinggi	1372	1386	1269	92.49	1242	89.61

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2017

Immunisasi campak yang diberikan kepada bayi di Kota Bukittinggi tahun 2017 adalah sebanyak 92,49 % bayi laki-laki (1269 orang) dan 89,61 % bayi perempuan (1242 orang).

f. Immunisasi Dasar Lengkap

Immunisasi Dasar Lengkap adalah bayi yang telah mendapatkan semua immunisasi mulai dari HB 0, BCG dan Polio1, DPT-HB3/DPT-HB-Hib3 1 dan Polio 2, DPT-HB3/DPT-HB-Hib3 2 dan Polio 3, DPT-HB3/DPT-HB-Hib3 3 dan Polio 4 serta mendapatkan campak.

Tabel 5.13 Cakupan Immunisasi Dasar Lengkap per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2017

No	Kecamatan	SASARAN		Jumlah Bayi mendapatkan Immunisasi Lengkap			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
				JML	%	JML	%
1	Mandiingin Koto Selayan	563	554	533	94.67	508	91,6
2	Guguk	511	516	441	86.30	470	91.98

	Panjang						
3	Aur Birugo Tigo Baleh	298	316	295	98.99	252	79.7
	Kota Bukittinggi	1372	1386	1269	92.49	1230	89.65

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2017

Selama tahun 2017, bayi laki-laki yang telah mendapatkan imunisasi lengkap sebanyak 92,49% (1269 orang) sedangkan untuk bayi perempuan adalah sebanyak 89,65% (1230 orang).

8. Upaya Penanggulangan Gizi Buruk pada Balita

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan laporan LB3 Gizi dari 7 Puskesmas yang ada di Kota Bukittinggi ditemukan 19 orang (0,23%) Balita laki-laki yang memiliki berat badan di bawah garis merah (BGM) pada KMS dan 19 orang (0,23%) balita perempuan. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.14 Cakupan Balita Bawah Garis Merah Kota Bukittinggi Tahun 2017

No	Kecamatan	Ditimbang		Jumlah Balita BGM			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
				JML	%	JML	%
1	Mandiingin Koto Selayan	599	597	8	1,3	7	0.1
2	Guguk Panjang	924	650	12	1,2	8	1,2
3	Aur Birugo Tigo Baleh	762	304	2	0,6	1	0.3
	Kota Bukittinggi	1842	1551	22	1,2	16	1,0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2017

9. Penderita Tuberkulosis (TB Paru)

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*, TB menyerang paru-paru. Gejala TB Paru

dimulai secara bertahap selama periode mingguan atau bulanan. Obat TB atau disebut OAT harus diminum selama 6 bulan

Jumlah kasus baru BTA+ yang ditemukan di Kota Bukittinggi pada tahun 2016 sebanyak 126 kasus. Jumlah tersebut lebih banyak bila dibandingkan kasus baru BTA+ yang ditemukan tahun 2015 yang sebesar 113 kasus. (Angka ini berasal dari Puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di BBKPM/BPKPM/BP4, RS, Lembaga Pemasyarakatan rumah tahanan, dokter praktek swasta, klinik dll

Menurut jenis kelamin, kasus baru BTA+ pada laki-laki hampir 1,35 kali dibandingkan kasus BTA+ pada perempuan. Kasus BTA+ pada kelompok umur 0-14 tahun di Kota Bukittinggi sebanyak 35 kasus atau 15% dari seluruh kasus TB + di Kota Bukittinggi.

Jumlah kasus yang diobati adalah sebanyak 35 kasus laki-laki dan 26 kasus perempuan. Angka keberhasilan pengobatan yaitu 80% pada laki-laki dan 69 % pada perempuan. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.15. Angka Kesembuhan dan Pengobatan Lengkap TB Paru BTA + Per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2017.

No	Kecamatan	BTA + (diobati)		Angka Kesembuhan		Angka Keberhasilan Pengobatan	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR
1.	Mandiingin Koto Selayan	9	6	11	8	106,5	66,77
2	Guguk Panjang	24	16	15	6	67,8	82
3	Aur Birugo Tigo Baleh	9	7	4	3	66,7	42,8
	Kota Bukittinggi	59	46	55	42	80	63

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2017

Sedangkan untuk tahun 2017 kasus yang diobati adalah 59 kasus laki-laki dan 46 kasus perempuan yang dilaporkan dari Puskesmas dan Rumah Sakit yang ada di Bukittinggi.

10. Penderita HIV /AIDS

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Human Immunodeficiency Virus yang menyerang system kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebaga HIV positif.

Pemetaan epidemi HIV di Indonesia dibagi menjadi lima kategori, yaitu <90 kasus, 90-206 kasus, 207-323 kasus, 324-440 kasus, dan > 440 kasus.

Di Kota Bukittinggi pada tahun 2017 kasus HIV sebanyak 36 kasus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebanyak 30 kasus, dimana penderita tersebut kebanyakan berasal dari luar wilayah Bukittinggi namun melakukan pengobatan di RSAM Bukittinggi.

Menurut jenis kelamin, proporsi kasus baru AIDS di Kota Bukittinggi tahun 2016 pada kelompok laki-laki lebih besar dibandingkan persentase pada kelompok perempuan. Sedangkan pada tahun 2017 kasus AIDS sebanyak 38 kasus menurun dibandingkan tahun 2016. Tabel dibawah ini merupakan kasus HIV AIDS tahun 2017

Tabel 5.16 Cakupan Penderita HIV/AIDS berdasarkan Kelompok Umur Kota Bukittinggi Tahun 2017

No	Umur	HIV			AIDS		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	≤ 4 th	0	0	0	0	0	0
2	5 - 14 th	0	0	0	0	0	0
3	15 – 19 th	0	0	0	0	0	0
4	20 – 24 th	1	2	3	3	0	3
5	25 – 49 th	23	10	33	33	0	33
6	≥50 th	0	0	0	2	0	2
	Total	24	12	36	38	0	38

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2017

11. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Keluarga mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, karena dalam keluarga terjadi komunikasi dan interaksi antara anggota keluarga yang menjadi awal penting dari suatu proses pendidikan perilaku.

Pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini dalam keluarga dapat menciptakan keluarga yang sehat dan aktif dalam setiap upaya kesehatan di masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kesehatan anggota keluarga, Pusat Promosi Kesehatan Kemenkes berupaya meningkatkan persentase rumah tangga ber-PHBS.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.

Untuk mencapai rumah tangga ber-PHBS, terdapat 10 perilaku hidup bersih dan sehat yang dipantau, yaitu:

- (1) persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan,
- (2) memberi ASI eksklusif,
- (3) menimbang balita setiap bulan,
- (4) menggunakan air bersih,
- (5) mencuci tangan dengan air bersih dan sabun,
- (6) menggunakan jamban sehat,
- (7) memberantas jentik di rumah sekali seminggu,
- (8) makan buah dan sayur setiap hari,
- (9) melakukan aktivitas fisik setiap hari,
- (10) tidak merokok di dalam rumah.

Tabel 5.17 Persentase Rumah Tangga ber PHBS Per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2017

No	Kecamatan	Rumah Tangga				
		Jumlah	Jumlah Yang dipantau	% yang dipantau	Jml yang ber PHBS	% PHBS
1	Mandiingin Koto Selayan	10347	8600	83.1	4783	55.6
2	Guguk Panjang	10047	6446	64.2	4073	63.2
3	Aur Birugo Tigo Baleh	5170	4309	83.3	2447	56.8
	Kota Bukittinggi	25564	19355	75.7	11303	58.4

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2017.

Dari tabel di atas menunjukkan jumlah rumah tangga yang ber PHBS hanya 58,4 % yaitu 11.303 rumah tangga.

12. Posyandu

Tabel. 5.18 Jumlah Posyandu menurut Strata Posyandu per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2017

No	Kecamatan	Strata Posyandu				Jumlah	Posyandu Aktif	% posy aktif
		Pratama	Madya	Purnama	Mandiri			
1	Mandiingin Koto Selayan	0	0	39	9	48	48	100
2	Guguk Panjang	0	19	32	5	56	43	76.8
3	Aur Birugo Tigo Baleh	0	1	6	24	31	31	100
	Kota Bukittinggi	0	20	77	38	135	122	90.4

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2017

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah posyandu yang ada di Kota Bukittinggi adalah sebanyak 135 posyandu dan yang aktif adalah 122 posyandu (90,4%)

C.. Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu sarana untuk mengendalikan jumlah penduduk terutama untuk menekan angka kelahiran yang akhirnya menurunkan pertumbuhan penduduk. Sejak era otonomi daerah digulingkan yang berakibat pada desentralisasi kebijakan kependudukan, pelaksanaan program KB mengalami banyak kemunduran . Meskipun sudah ada upaya revitalisasi program KB Nasional sejak tahun 2009 namun belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

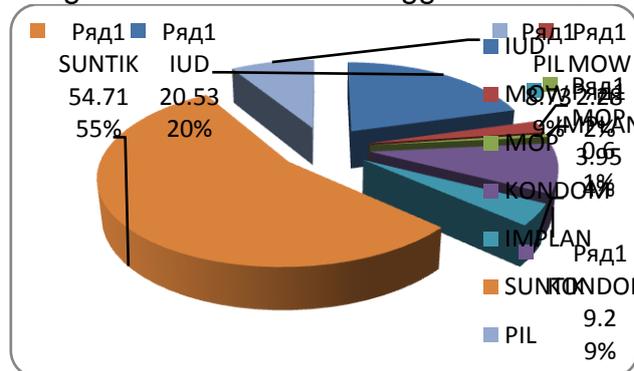
Tabel 5.19 Jumlah Peserta KB Aktif Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017

No	Kecamatan	Peserta KB Perempuan						Peserta KB Pria			Total
		IUD	MOW	Implant	Suntik	Pil	Jml	MOP	Kon dom	Jml	
1	Mandiingin Koto Selayan	1384	132	351	1781	417	4065	17	243	260	4325
2	Guguk Panjang	1076	192	478	1372	395	3513	32	239	271	3784
3	Aur Birugo Tigo Baleh	556	157	147	1068	233	2161	10	216	226	2387
	Kota Bukittinggi	3016	481	976	4221	1045	9739	59	698	757	10496

Sumber : Dinas DP3APPKB Kota Bukittinggi Tahun 2017

Persentase Pasangan Usia Subur peserta KB berdasarkan Metode Kontrasepsi yang pernah digunakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Gambar 5.3 Persentase penggunaan Kontrasepsi Modern yang pernah digunakan di Kota Bukittinggi Tahun 2017.



Sumber Dinas P3APPKB Tahun 2017

Jumlah Peserta KB Baru (PB) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.20 Peserta KB Baru (PB) per kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017

No	Kecamatan	Peserta KB Perempuan						Peserta KB Pria			Total
		IUD	MO W	Im pla nt	Sunt ik	Pil	Jml	M OP	Kon dom	Jml	
1	Mandiingin Koto Selayan	398	11	107	593	193	1302	3	77	80	1382
2	Guguk Panjang	400	186	148	519	174	1427	2	121	123	1550
3	Aur Birugo Tigo Baleh	212	7	59	427	106	811	0	121	121	932
	Kota Bukittinggi	1010	204	314	1539	473	3540	5	319	324	3864

Sumber Dinas P3APKB Tahun 2017

D. Usia Perkawinan Pertama

Umur perkawinan Pertama bagi perempuan sangat mempengaruhi resiko melahirkan. Semakin rendah umur perkawinan pertama atau semakin tinggi umur perkawinan pertama bagi perempuan dari umur yang dianjurkan dalam program Keluarga Berencana, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan proses melahirkan. Hal ini disebabkan belum matangnya kondisi perempuan baik secara fisik maupun psikologis, disamping itu bagi usia perkawinan pertama yang masih tergolong muda akan mengakibatkan anak tidak memperoleh hak atas pendidikan, hak bermain, kehilangan masa remaja dan kehilangan masa-masa dimana mereka seharusnya bias mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam hidup.

Usia Perkawinan Pertama Hasil pendataan Keluarga Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.21 Usia Perkawinan Pertama di Kota Bukittinggi tahun 2017

Kecamatan	Usia <16 th			Usia 16-24 tahun			Usia >25 tahun		
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
Mandiingin Koto Selayan	0	1	1	117	162	279	260	593	853
Guguk Panjang	0	0	0	38	78	116	251	179	430
Aur Birugo Tigo Baleh	0	0	0	34	68	102	161	127	288
Kota Bukittinggi	0	1	1	189	308	497	672	899	1571

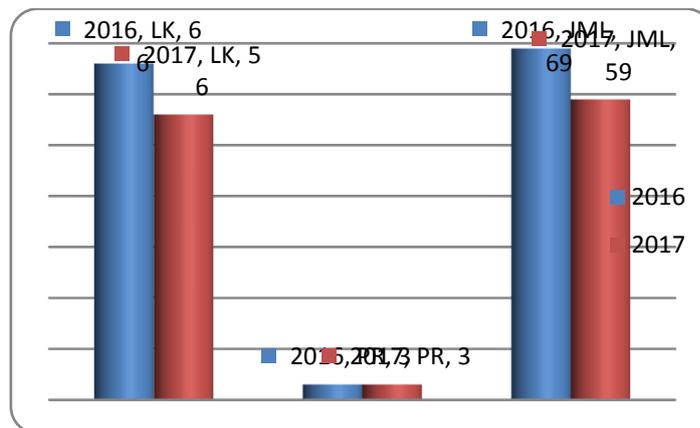
Sumber : Kankemenag Kota Bukittinggi Tahun 2017.

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 1 orang perempuan yang menikah diusia muda , dan terlihat bahwa perkawinan pertama pada perempuan di Kota Bukittinggi sebagian besar adalah pada usia lebih dari 25 tahun.

E. Penggunaan Narkotika, Psikotropika, zat adiktif lainnya (NAPZA)

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Gambar 5.4. Jumlah penyalahgunaan Narkoba yang ditangani oleh penegak hukum di Kota Bukittinggi Tahun 2016 dan 2017



Sumber : Polresta Kota Bukittinggi Tahun 2017.

Gambar di atas memperlihatkan terdapat 59 orang pengguna narkoba yang ditangani Kepolisian tahun 2017 yang terdiri dari 56 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.

Pengguna narkoba ternyata sudah tidak memandang jenis kelamin, dibuktikan dengan kasus yang terjadi ternyata walaupun dalam jumlah yang sedikit dibandingkan dengan laki-laki, perempuan yang sudah menjadi pengguna narkoba akan berdampak sangat besar pada masa depan perempuan tersebut dan keturunannya kelak.

BAB VI EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak hanya bertujuan untuk membantu memenuhi perekonomian rumah tangga dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya, tetapi juga untuk mencapai kepuasan individu. Oleh karena itu keterlibatan perempuan dalam urusan ketenaga kerjaan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Semakin banyak perempuan yang bekerja, secara tidak langsung dapat menunjukkan semakin banyak perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Secara umum penduduk yang telah memasuki usia kerja diharapkan mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan perekonomian, demikian pula dengan penduduk perempuan. Penduduk yang telah memasuki usia kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri atas penduduk bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Data mengenai ketenagakerjaan di Indonesia diperoleh berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun.

A. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari

pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah berusia minimal 15 tahun keatas. Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja, bisa jadi mereka tergolong bukan angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Misalnya ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa dan sebagainya.

Tabel 6.1. Jumlah penduduk Berusia 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dan jenis kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2017

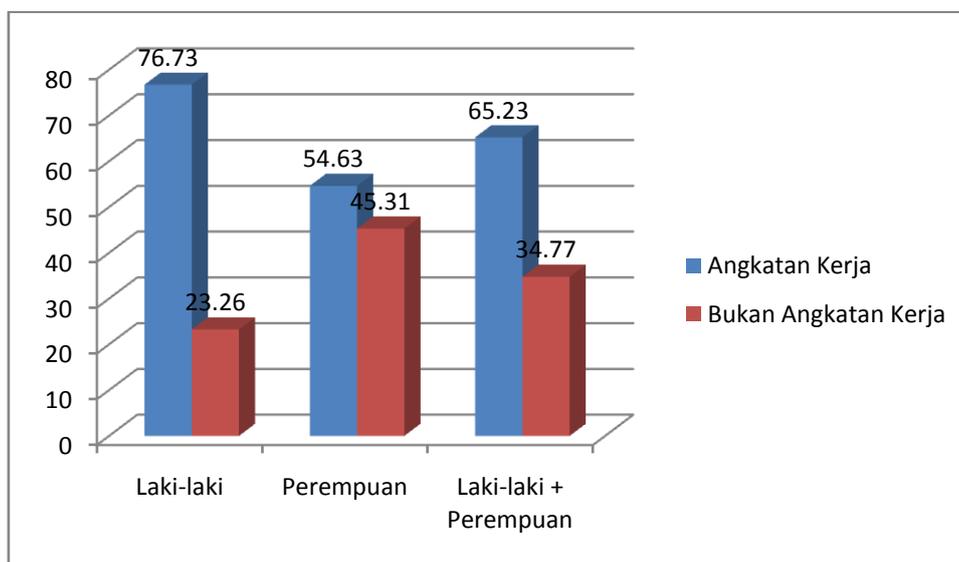
No	Kegiatan Utama	Lak-laki	Perempuan	LK +PR
I	Angkatan Kerja	33922	26384	60.306
	1. Bekerja	31 530	24 591	56.121
	2. Pengangguran	2.392	1.793	4 185
II	Bukan Angkatan Kerja	10.286	21 865	32.151
	1. Sekolah	5 816	8.935	14.751
	2. Mengurus rumah tangga	1.622	11.569	13 191
	3. Lainnya	2 848	1 361	4 209
III.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76,73	54,63	65,23
IV	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7.05	6,80	6,94

Sumber BPS kota bukittinggi th 2017, Hasil Sarkernas 2017

Dari tabel 6.1. memperlihatkan jumlah angkatan kerja Kota Bukittinggi sebanyak 60.306 jiwa. Terbagi menjadi 2 golongan yaitu penduduk yang bekerja sebanyak 56.121 orang (93,06%) dan pengangguran 4.185 orang (6,93%).

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin terlihat angkatan kerja laki- laki lebih banyak dari pada perempuan yaitu laki-laki 76,73 % berbanding 54,63 % perempuan. Sebaliknya perempuan yang bukan angkatan kerja lebih besar dibandingkan laki-laki yaitu perempuan 21.865 orang (45,31%) berbanding dengan laki-laki sebanyak 10.286 orang (23,26%). Seperti terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 6.1. Angkatan Kerja dan bukan Angkatan Kerja menurut jenis kelamin tahun 2017



Sumber BPS Kota Bukittinggi Tahun 2017

Banyaknya perempuan yang tidak termasuk angkatan kerja disebabkan perempuan yang berstatus ibu rumah tangga juga besar yaitu sebanyak 11.569 orang atau sebesar 52,91% dari seluruh wanita bukan angkatan kerja.

Tabel 6.1 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2017

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	15 -19	1911	731	2642
2	20-24	3038	2854	5892
3	25-29	4507	3307	7814
4	30-34	4313	3536	7849

5	35-39	5748	3999	9747
6	40-44	3288	2698	5986
7	45-49	3388	3308	6696
8	50-54	3579	2215	5794
9	55-60+	1880	1428	3308
10	60 +	2270	2308	4578

Sumber Sakernas BPS 2017

Tabel diatas menunjukkan angkatan kerja menurut golongan usia. Golongan 35-39 tahun adalah golongan umur yang paling produktif. Jika dilihat dari semua golongan umur, terlihat golongan umur 20 – 54 tahun merupakan umur produktif di Kota Bukittinggi. Bila dilihat dari jenis kelamin terlihat bahwa perempuan produktif adalah pada usia 30 tahun keatas.

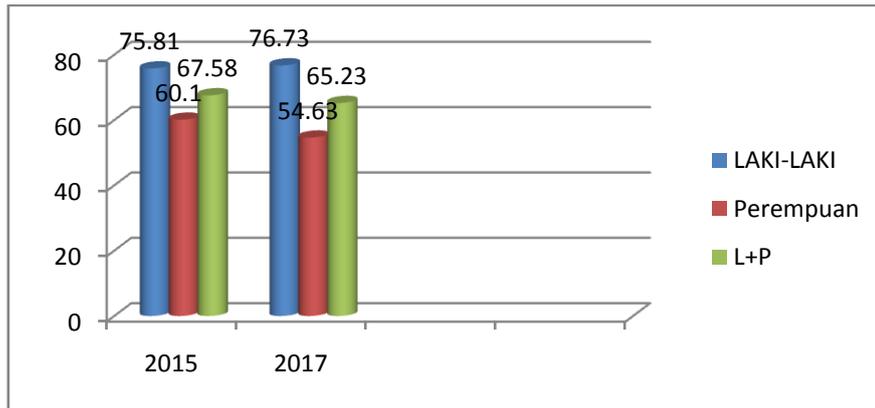
B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dilihat dari proporsi penduduk yang masuk kedalam pasar kerja (bekerja maupun mencari pekerjaan) disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Semakin tinggi TPAK menunjukkan sebagian besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif.

Pada tahun 2017 terlihat TPAK perempuan lebih rendah dari pada TPAK Laki-laki. Hal ini menunjukkan keterlibatan perempuan pada kegiatan ekonomi (pasar kerja) lebih rendah dari pada laki-laki. TPAK laki-laki sebesar 76,73 persen sedangkan perempuan sebesar 54,63 persen.

Jika dibandingkan dengan tahun 2015, terjadi penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dari 60,10 % menjadi 54,63 % sedangkan laki-laki meningkat dari 75,81 % di tahun 2015 menjadi 76,73% di tahun 2017 seperti terlihat pada grafik berikut :

Gambar 6.2 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut jenis kelamin di Bukittinggi Tahun 2015 dan 2017



Sumber Sakernas BPS 2017

C. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan persentase penduduk yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, dan yang tidak mencari pekerjaan atau tidak mempersiapkan usaha karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan karena sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja biasanya tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kemiskinan dan kerawanan sosial yang ditimbulkannya.

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persentase antara pengangguran laki-laki dan perempuan. TPT laki-laki 7,05 persen sedangkan TPT perempuan sebesar 6,80 persen.

D. Lapangan Usaha

Bekerja merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan aktivitas ekonomi suatu wilayah. Lapangan usaha yang terbesar di Kota Bukittinggi adalah pada perdagangan besar dan eceran, rumah makan dan hotel.

Tabel 6.3 Jumlah Penduduk yang bekerja menurut Lapangan Usaha di Kota Bukittinggi Tahun 2017

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Lak-laki	Perempuan	LK +PR
----	--------------------------	----------	-----------	--------

1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	1.525	605	2.130
2	Industri/ pengolahan	2.473	4.417	6.890
3	Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel	15.328	11.063	26.391
4	Jasa Kemasyarakatan, social dan perorangan	7.989	7.274	15.263
5	Lainnya	4.215	1.232	5.447

Sumber ; BPS, Hasil Sakernas 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa lapangan pekerjaan yang terbanyak baik laki-laki maupun perempuan banyak pada lapangan pekerjaan perdagangan, eceran, rumah makan , hotel dan jasa.

Tabel 6.4. Jumlah Pedagang yang berusaha pada petak toko dan los menurut lokasi di Kota Bukittinggi 2016

No	Lokasi Pasar	Basah	Kering	Jumlah
1	Pasar Atas	973	279	1252
2	Pasar Bawah	622	703	1325
3	Pasar Simpang Aur	1497	4383	5880
	Jumlah	3092	5365	8457

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

E. Status Pekerjaan

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/ kegiatan. Indikator status pekerjaan terdiri dari enam kategori yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, berusaha dibantu buruh tidak tetap, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas dan pekerja keluarga/pekerja tak dibayar.

Tabel 6.5. Jumlah Penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja seminggu yang lalu menurut status pekerjaan Utama di Kota Bukittinggi Tahun 2017

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	+
------------------------	-----------	-----------	-----------	---

			Perempuan
Berusaha sendiri	5155	5114	10269
Berusaha dibantu buruh tdk tetap/ buruh tak dibayar	3529	3530	7059
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	2594	785	3379
Buruh/ karyawan/ pegawai	16.265	10.011	26.276
Lainnya	3987	5151	9138

Sumber : Sakernas BPS Kota Bukittinggi Tahun2017

Bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai adalah status pekerjaan yang terbesar dari penduduk secara total, yaitu sebesar 10.011orang. Status pekerjaan terkecil dari penduduk yang bekerja adalah berusaha dibantu buruh tetap buruh dibayar, bila dilihat menurut gender, perempuan paling banyak bekerja pada status buruh/ karyawan/pegawai yaitu 10.011 orang,

F. Pekerja di Sektor Formal dan Informal

Pengelompokan tenaga kerja dapat dibedakan menurut kegiatan formal dan kegiatan informal. Pendekatan kelompok formal dan informal yang digunakan didasarkan kepada kombinasi antara status pekerjaan (employment status) dan jenis pekerjaan (occupation). Seorang pekerja dikategorikan pekerja formal didefinisikan sebagai pekerja yang berstatus “berusaha dibantu pekerja tetap/pekerja dibayar,” “buruh/karyawan,” di luar itu sebagai pekerja informal.

Tabel 6.6.Jumlah penduduk yang berkerja menurut status Formal dan Informal di Kota Bukittinggi Tahun 2017

No	Status	Laki-laki		Perempuan		Lak2 + Perempuan	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Formal	18.859	59,8	10796	43,9	29655	52,84
2	Informal	12.671	40,2	13795	56,1	26466	47,16
	Total	31.530	100	24591	100	56121	100

Sumber : Sakernas –BPS 2017

Kesulitan ekonomi dan tuntutan biaya kehidupan yang semakin tinggi, telah mendorong sebagian besar wanita untuk ikut berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarganya. Bagi wanita yang telah berkeluarga umumnya mereka bekerja untuk membantu suami dalam mencukupi biaya kehidupan sehari-hari. Dorongan dan keinginan wanita untuk bekerja tersebut sering kali tidak didukung oleh ketersediaan lapangan kerja, oleh karena itu mereka cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk bekerja disektor informal. Sektor informal merupakan bagian angkatan kerja di kota yang berada diluar pasar kerja yang terorganisir, yakni tidak tersentuh kebijakan pemerintah serta dapat meliputi kegiatan usaha yang sifatnya marginal dengan waktu kerja yang tidak teratur (Stephani, 2008).

Dari hasil survey angkatan kerja Nasional tahun 2017, sebanyak 56,1 persen penduduk perempuan bekerja di sektor non formal , lebih besar dibandingkan dengan laki-laki yaitu sebesar 40,2 persen.

G. Usaha Mikro dan Kecil (UKM)

Bukittinggi sebagai Kota wisata sangat besar pengaruhnya kepada roda perekonomian di Kota Bukittinggi, sehingga bermunculan usaha-usaha perekonomian masyarakat berupa Usaha Menengah Kecil dan Mikro yang terdiri dari sentra industri –sentra industri.

Tabel 6.7. Jumlah Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) Kota Bukittinggi Tahun 2016

Kec/Kriteria	Kecil	Menengah	Mikro	Grand Total
ABTB	535		2,092	2,627
Guguk Panjang	2,286	144	5,024	7,454
Mandiingin Koto Selayan	1,141	3	3,202	4,346
Grand Total	3,962	147	10,318	14,427

Sumber : Dinas Koperasi , UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi Tahun 2017

Tabel 6.7 diatas menggambarkan bahwa UMKM yang paling banyak terdapat di Kota Bukittinggi adalah usaha mikro. Usaha mikro ini tersebar sebagian besar di Kecamatan Guguk Panjang dan lebih banyak dikelola oleh perempuan seperti terlihat pada tabel 6.8 berikut

Tabel 6.8. Data Jumlah Tenaga Kerja menurut Jenis Kelamin pada UMKM Kota Bukittinggi Tahun 2016

KECAMATAN	KECIL			MENENGAH			MIKRO		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
ABTB	43	45	88				581	644	1225
G. PANJANG	686	463	1149	51	35	86	2127	2347	4474
MKS	143	129	272	15	10	25	983	1242	2225
JUMLAH	872	637	1509	66	45	111	3691	4233	7924

Sumber : Dinas Koperasi , UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi Tahun 2017

Tabel diatas menggambarkan bahwa tenaga kerja pada usaha kecil dan menengah lebih banyak dikelola oleh laki -laki–dibandingkan dengan tenaga perempuan , sedangkan untuk usaha mikro lebih banyak peranan perempuan dari pada laki-laki.

Data sentra industri yang ada di Kota Bukittinggi, pada umumnya bergerak pada industri pangan, sandang, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronik serta kerajinan. Jenis industri pangan terbanyak adalah usaha kue basah, kerupuk dan sejenisnya. Dan usaha ini lebih banyak menyerap tenaga kerja. Sedangkan jumlah industri di bidang sandang lebih banyak mengelola pakaian jadi dari tekstil dan juga banyak menyerap tenaga kerja , Jenis industri lain yang banyak di Kota Bukittinggi yaitu kerajinan khususnya bordir dan sulaman yang tenaga kerjanya pada umumnya adalah perempuan.

Tabel 6.9 Data Umum Industri di Kota Bukittinggi

N o.	JENIS INDUSTRI	Komoditi	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
1	PANGAN	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	3	8
2		Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran	15	41
3		Industri Tahu Kedelai	21	82
4		Industri Berbagai macam Tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan sejenisnya	6	22
5		Industri roti & sejenisnya	31	121
6		Industri kndaricoklat & kembang. Gula	8	13
7		Industri makaroni, mie, spagheti, bihun, so'und dan sejenisnya	6	12
8		Industri pengolahan teh & kopi	72	160
9		Industri bumbu masak & penyedap makanan	2	12
10		Industri Kue Basah	258	660
11		Industri makanan dan kedeledak kacang-kacangan lainnya selain kecap dan tempe	27	59
12		Industri Kerupuk dan sejenisnya	165	558
13		Industri Minuman ringan	8	29
		industri Air Minum dan Air Mineral	93	232
14	SANDANG	Industri brgjd (kain) rajutan	6	19
15		Industri brg.jdte stilkecuali untuk pakaian jadi	81	365
16		Industri pakaian jadi dari tekstil	373	1933
17		Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi	24	75
18		Industri brgdr kulit hewan	4	5
19		Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	92	396
20	KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN	Industri Moulding dan komponen bahan bangunan	29	95
21		Industri percetakan	72	243
22		Industri pupuk alam / Non Sintetis haramakro primer	3	8
23		Industri Kosmetik	1	4
24		Industri Jamu	5	10
25		Industri Batu Bata dr tanah liat	71	392
26		Industri gips	7	7
27		Industri brgdr semen	10	39
28		Industri brgdr kapur	5	18
29		Industri Furnitur dr kayu	55	229
30		Usaha rekaman	10	37
31	LOGAM DAN ELEKTRONIKA	Industri Brgdr logam bukan aluminium siap pasang utk bngnan	60	201
32		Industri brgdr logam aluminium	16	45
33		Industri macam2 wadah dr lgm	8	14
34		Pemeliharaan dan reparasi sepeda motor	21	53
35		Pemeliharaan dan reparasi mobil	64	154

36	KERAJINAN	Industri bordir/sulaman	303	1955
37		Industri Anyaman dari Bambu	1	3
38		Industri kerajinan ukir-ukir dan kayu kecuai furnitur	29	109
39		Industri Pengolahan lain yang tidak di klasifikasikan di tempat lain	67	213
		Jumlah	2,132	8,631

Sumber : Dinas Koperasi , UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi Tahun 2017

H. Koperasi

Koperasi merupakan badan hukum yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi terdiri dari beberapa jenis tergantung kepada tujuan koperasi atau latar belakang koperasi, misalnya koperasi Pegawai negeri Sipil ,Koperasi Simpan Pinjam dan lain-lain. Kota Bukittinggi memiliki 92 koperasi pada 3 kecamatan, dan sudah bisa menyerap tenaga kerja /karyawan , seperti pada tabel berikut :

Tabel 6.10 Partisipasi Perempuan sebagai Pengurus Koperasi Per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2017

No	Kec	Aktif	Tdk Aktif	Jml Kop	Manager			Karyawan		
					L	P	L+P	L	P	L+P
1	MKS	13	1	14	1	0	1	21	10	31
2	ABTB	25	0	25	0	1	1	31	38	69
3	GP	49	4	53	0	3	3	24	62	86
	TOTAL	87	5	92	1	4	5	76	110	186

Sumber : Dinas Kop.UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi Tahun 2018

Data diatas memperlihatkan bahwa baik manager maupun karyawan yang menjadi pengurus koperasi sudah diduduki oleh lebih banyak kaum perempuan, hal ini membuktikan bahwa perempuan sudah dapat dipercaya sebagai tenaga yang dianggap mampu mengelola koperasi.

I. Kepala Keluarga Miskin

Kemiskinan adalah permasalahan sosial yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena akan berdampak langsung terhadap permasalahan ekonomi, sosial dan keamanan .

Tabel. 6.11 . Persentase Kepala Keluarga Miskin di Kota Bukittinggi tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Jml Keluarga Miskin	%
1	Guguak Panjang	8.031	201	2,5
2.	Mandiingin Koto Selayan	10.481	279	2,66
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	4.906	111	2,26
	Bukittinggi	23.418	591	2,52

Sumber : LK2S Kota Bukittinggi Tahun 2017

J. Pekerja pada Instansi Lembaga Pemerintah / Non Pemerintah

Tabel 6.12 Tenaga Kerja di Lembaga / BUMN/ BUMD/Instansi Vertikal

No	Lapangan Usaha	Jumlah Tenaga Kerja		JUMLAH
		L	P	
1	Kantor Pos	20	15	35
2	Bank Nagari	68	52	120
3	BRI	101	79	180
4	BNI	41	72	113
5	BTN	12	5	17
6	Kemenag	61	51	112
7	BPS	7	17	24

Tabel 6.13. Tenaga Dosen, Karyawan Dan Mahasiswa Perguruan Tinggi Tahun 2017 Di Kota Bukittinggi

No	NAMA PERGURUAN TINGGI	REKTOR/ DEKAN		DOSEN		KARYAWAN/ TENAGA PENDIDIK	
		L	P	L	P	L	P

1	UNP PGSD			15	29	6	6
2	AMIK BUKITTINGGI			6	10	5	6
3	UNIVERSITAS MHD NATSIR	1		4	11	4	2
4	IAIN						
5	STISIPOL						
6	FAK.HUKUM MUHAMMADIYAH SUMBAR	1	1	23	10	7	5
7	POLTEKES PRODI KEBIDANAN	0	0	2	13	2	9
8	POLTEKES PRODI KESEHATAN GIGI	0	0	6	12	17	5
9	STIKES PRIMA NUSANTARA	3	6	3	8	8	4
10	STIKES YARSI	0	0	4	29	10	10
11	STIKES FORT DE KOCK	2	9	10	58	7	8
12	STIKES PERINTIS	3	9	5	15	14	19
13	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH	0	0	5	21	1	5
14	AKBID PELITA ANDALAS	0	4	1	6	1	3
15	AKFAR DWI FARMA	0	0	4	7	11	11
16	AKFAR YAYASAN IMAM BONJOL (YIB)	1	3	2	4	1	4

Tabel 6.14. Jumlah Tenaga Kesehatan (Medis) di Kota Bukittinggi Tahun 2017

No	Jenis Profesi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Dokter.Spesialis	76	57	133
2	Dokter umum	36	76	112
3.	Dokter gigi	6	30	36
4.	Bidan	0	263	263
5.	Perawat	152	811	963
6.	Perawat gigi	7	38	45
7.	Tenaga Teknis kefarmasian	20	147	167
8.	Apoteker	13	49	62
9	Kesehatan Masyarakat	27	49	76
10	Kesehatan Lingkungan	5	7	12
11	Nutrisionis	4	36	40
12	Dietision	0	5	5
13	Keterampilan Fisik	18	23	41
14	Keteknisian Medis	68	129	197
15	Tenaga Kesehatan Lain	11	99	110
	JUMLAH	443	1819	2262

BAB VII

BIDANG POLITIK DAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

Keterlibatan perempuan dalam politik, merupakan sebuah keharusan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan secara politis. Dikuatirkan rendahnya keterlibatan perempuan di partai politik dan parlemen, berdampak langsung pada kecilnya alokasi perhatian terhadap pembangunan kesejahteraan perempuan, karena kebijakan-kebijakan dibuat tidak berdasarkan pada kepentingan dan kebutuhan perempuan, sehingga perempuan hanya diposisikan sebagai objek pembangunan dimana hak-hak dan kebutuhan kesejahteraannya terabaikan.

Akhirnya yang terjadi adalah, perempuan selalu berada pada posisi yang marjinal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator, diantaranya dilihat dari sistem pengupahan, upah perempuan lebih rendah daripada laki-laki, jaminan kesehatan perempuan lebih rendah dari pada laki-laki, kebijakan-kebijakan moralitas lebih berpihak pada laki-laki dan sebagainya. Minimnya keterlibatan dan partisipasi politik perempuan ini, menjadi penyumbang terhadap termarjinalnya perempuan dalam pembangunan.

Oleh sebab itulah negara-negara penanda tangan konvensi CEDAW PBB di desak untuk melakukan tindakan nyata dalam mengatasi segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan. Di Indonesia salah satunya lahir gerakan *affirmative action* tindakan khusus yang dilakukan oleh negara untuk memberikan peluang, kesempatan dan dorongan kepada perempuan agar terlibat dan berpartisipasi dalam politik. *Affirmative action* juga dapat difahami sebagai kompensasi negara terhadap perempuan yang selama ini termarjinalkan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang tidak berwawasan gender

tersebut. *Affirmative action* ini berlaku setelah pemerintahan reformasi di Indonesia.

Bentuk dari *affirmative action* itu diantaranya adalah, *pertama* mengaruskan pada semua partai politik dimana 30% pengurusnya adalah perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat 1 UU No 12/2003. *Kedua* mengajukan prinsip keterwakilan perempuan dimana masing-masing partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan untuk memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Prinsip keterwakilan ini lebih dikenal dengan prinsip kuota 30% keterwakilan perempuan.

A. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur penting dalam pengambilan kebijakan di daerah. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD mempunyai kebijakan yang sangat strategis dalam bidang politik, budaya, pembangun, ekonomi dan kesejahteraan. Untuk itu, sangat diperlukan keberimbangan anggota DPRD tersebut, sehingga terwujud ada kebijakan yang berimbang antara kepentingan kesejahteraan laki-laki dan perempuan.

Di kota Bukittinggi, kiprah perempuan dalam politik pertama-tama dapat dilihat dari komposisi perempuan dalam bidang politik. Data menunjukkan bahwa perempuan telah terlibat dalam bidang politik, hanya saja apabila dibandingkan dengan laki-laki, keterlibatan perempuan jauh lebih rendah, hanya 2 orang (8%) perempuan yang duduk di legislatif dibandingkan laki-laki 23 orang (92%).

Tabel 7. 1 Jumlah Anggota DPRD Kota Bukittinggi menurut partai dan Jenis Kelamin, Kota Bukittinggi Tahun 2017

NO	PARTAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L+P
1	NASDEM	1		1
2	PKB	1		1
3	PKS	3		3
4	PDIP	1		1
5	GOLKAR	4		4

6	GERINDRA	4		4
7	DEMOKRAT	2	2	4
8	PAN	3		3
9	PPP	3		3
10	HANURA	1		1
	TOTAL	23	2	25

Sumber : Setwan DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2017

Angka ini masih jauh dari yang dicita-citakan, yakni 30% menurut Undang-undang No 10/2008 tentang Pemilihan umum anggota DPR,DPRD dan DPD.

Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya rendahnya kemauan perempuan untuk terlibat dalam politik atau belum munculnya kesadaran perempuan dalam berpolitik. Pada hal undang-undang sudah memberikan peluang yang sangat besar agar perempuan mempunyai keterlibatan dalam berpolitik.

Keberdaan perempuan di DPRD akan terlihat peranannya di komisi yang ada. Misalnya tugas komisi A terkait dengan pemerintahan yang meliputi pemerintahan kelurahan dan nagari, ketertiban, keamanan, penerangan, pers, hukum dan perundang-undangan, kepegawaian, aparatur dan ketenaga kerjaan, perizinan, sosial politik, organisasi kemasyarakatan, pertanahan, kependudukan, agama dan sosial budaya.

Komisi B mempunyai tugas di bidang perekonomian, keuangan dan kesejahteraan, meliputi perdagangan dari dalam dan luar negeri, perindustrian, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pengadaan pangan, logistik, koperasi, keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah, perusahaan patungan, dunia usaha dan penanaman modal, pengelolaan pasar, kesejahteraan rakyat meliputi pendidikan, ilmu dan teknologi, kepemudaan dan olahraga, kesehatan dan keluarga berencana, peranan wanita serta pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan Komisi C bidang pembangunan meliputi pekerjaan umum, tata kota, pertamanan, kebersihan, perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata, lingkungan hidup, perumahan rakyat, pertambangan dan energi, perencanaan pembangunan.

Pada masing-masing tiga komisi tersebut mempunyai jumlah anggota yang berbeda-beda, termasuk juga perbedaan-perbedaan jumlah perempuan dalam masing-masing komisi tersebut. Bahkan khusus di Komisi C tidak ada anggota perempuan dalam komisi tersebut. Tentang jumlah sebaran anggota DPRD di masing-masing Komisi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.2 Jumlah Anggota DPRD Kota Bukittinggi menurut Komisi dan Jenis Kelamin, Kota Bukittinggi Tahun 2017

NO	KOMISI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L+P
1	I	7	1	8
2	II	8	1	9
3	III	8		8
	TOTAL	23	2	25

B. Peran dan Komposisi Perempuan di Lembaga Eksekutif

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu urat nadi dalam organisasi pemerintahan, karena PNS sebagai penyelenggara pemerintahan. Oleh sebab itu, jumlah PNS yang tersedia secara lengkap dan profesional merupakan salah satu hal yang sangat mendukung terselenggaranya pemerintahan yang berkualitas dan baik. PNS juga berperanan sebagai pelayan daripada masyarakat, oleh sebab itu jumlahnya juga sangat menentukan terhadap kualitas layanan tersebut. Saat ini, di kota Bukittinggi terdapat sebanyak 2.804 orang PNS yang akan melayani 126.804 penduduk kota Bukittinggi.

Dari 2.804 jumlah PNS yang ada di Kota Bukittinggi, terdapat 1665 perempuan atau 59,37% dan 1139 laki-laki atau 40,63 %. Dengan demikian PNS berjenis kelamin perempuan lebih banyak di bandingkan dengan PNS laki-laki di kota Bukittinggi.

Bila dilihat dari jenis pendidikan terdapat pendidikam terbanyak adalah sarjana S1 dan S2 sebanyak 178 orang. Jumlah PNS Kota Bukittinggi menurut

pendidikan dan jenis kelamin ini dapat dilihat dengan jelas pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin , Kota Bukittinggi Tahun 2017.

PENDIDIKAN	LAK-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
SD	80	3	83
SMP	39	3	42
SMA	358	211	569
D.1	0	12	12
D.2	16	88	104
D.3	72	268	340
D.4	16	10	26
S.1	460	990	1450
S.2	98	80	178
S.3	0	0	0
TOTAL	1139	1665	2804

Selanjutnya, jika dilihat lebih rinci jumlah PNS menurut golongan dan jenis kelamin di Kota Bukittinggi maka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya PNS perempuan bergolongan I dan II jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki. Disamping itu, di golongan III dan IV , PNS perempuan lebih banyak daripada laki-laki, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.4 Jumlah PNS menurut golongan ruang dan jenis kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2017

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I	94	5	99
II	322	193	515

III	524	1051	1575
IV	199	416	615
Total	939	1665	2804

2. Perempuan Menduduki Jabatan Eselon

Sampai Agustus 2018, PNS yang menduduki jabatan eselon di Kota Bukittinggi berjumlah 590 orang. Dari jumlah tersebut hanya 3 orang yang menduduki eselon II sebagai pengambil kebijakan. Dimana laki-laki lebih dominan yaitu 23 orang, pada hal jumlah perempuan menjadi PNS di Kota Bukittinggi lebih banyak dari pada laki-laki. Perbandingannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.5 Jumlah PNS menurut Esselon dan Jenis Kelamin , Kota Bukittinggi Tahun 2018.

ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
II.a	1	0	1
II.b	22	3	25
III.a	29	9	38
III.b	40	28	68
IV.a	159	174	333
IV.b	33	84	117
V.a	1	7	8
Total	285	305	590

Sumber : BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2018

3. Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin

Pada tabel 7.6 dibawah terlihat bahwa PNS yang menduduki jabatan Fungsional lebih didominasi oleh perempuan yang tersebar sebagai tenaga pendidik/ guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, PLKB dan lain-lain.

Tabel. 7.6 Jumlah Tenaga Pegawai Negeri Sipil menurut jenis Kelamin Tahun 2018.

Jenis PNS	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PNS Struktural	960	857	1817
PNS Fungsional Guru	129	631	760
PNS Fungsional Lain	50	177	227
	1139	1665	2804

Sumber : BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2018

4. Camat

Di Kota Bukittinggi terdapat tiga kecamatan, yakni kecamatan Guguk Panjang, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan Aur Birugo Tigo Baleh. Masing-masing kecamatan ini dipimpin oleh seorang camat. Untuk ketiga kecamatan tersebut camatnya laki-laki dan bahkan belum pernah ada perempuan.

Pada tingkat kecamatan, masyarakat belum pernah dipimpin oleh seorang camat perempuan. Jika dilihat pada masing-masing kecamatan itu perempuan selalu lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki

Tabel 7.7 Jumlah Camat di Kota Bukittinggi Tahun 2017

NO	KECAMATAN	L	P
1	Guguk Panjang	1	0
2	Mandiangin Koto	1	0

	Selayan		
3	Aur Birugo Tigo Baleh	1	0
	JUMLAH	3	0

Sumber : BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2018

5. Jumlah Lurah di Kota Bukittinggi

Di Kota Bukittinggi terdapat 24 kelurahan dari tiga kecamatan. Di kota Bukittinggi hanya ada lurah dan tidak ada nagari, namun sampai Agustus 2017 ini hanya 3 lurah adalah perempuan. Sebagaimana datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel.7.8 Jumlah Lurah menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2018

No	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Guguk Panjang	6	1	7
2	Mandiingin Koto Selayan	8	1	9
3	Aur Birugo Tigo Baleh	7	1	8
	JUMLAH	21	3	24

Sumber : BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jabatan-jabatan strategis sampai pada kelurahan di Kota Bukittinggi didominasi oleh laki-laki.

Selain dari lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, juga terdapat PNS yang dari jalur vertical, seperti dari Kementerian Agama, adapun PNS dari Kemenag Kota Bukittinggi adalah seperti tabel berikut :

Tabel 7.9 Jumlah Pegawai dilingkungan Kementerian Agama berdasarkan jenis kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2017

No	Instansi	PNS			NON PNS		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1.	KANKEMENAG	61	51	112			
2.	MADRASAH	36	157	193	14	46	60
3.	PENYULUH AGAMA	12	9	21	16	8	24
4	DA'I	27	4	31	45	4	49
5	MIS,TPA,RA		1	1	2	26	28
6	MDTA	13	8	21	90	212	302
	JUMLAH	149	230	379	167	296	463

Sumber : Kankemenag Bukittinggi th 2017

C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif

1. Jaksa menurut jabatan dan jenis kelamin

Tabel. 7.10 Data ketenagaan pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi

No	Jabatan	Tahun 2016		Tahun 2017	
		LK	PR	LK	PR
1.	Kepala Kejaksaan Negeri	1		1	
2.	Kepala Sub Bag Pembinaan		1		1
3.	Kepala Seksi Inteligen	1		1	
4.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	1		1	
5.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	1		1	

6.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara		1		1
7.	Kepala Urusan Kepegawaian		1		1
8.	Kepala Urusan Keuangan		1		1
9	Kepala Urusan Data Statistik dan Kriminologi	1		1	

Sumber : Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi Tahun 2017

2. Hakim menurut Jabatan dan jenis kelamin

Tabel. 7.11 Data Hakim menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017

NO	JABATAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017	
		L	P	L	P
1	KETUA		1		1
2	WAKIL KETUA	1			
3	HAKIM	5	4	2	2
4	PANITERA		1		1
5	SEKRETARIS		1	1	
6	WAKIL PANITERA	1		1	
7	PANITERA MUDA	2	1	2	1
8	KEPALA SUB BAGIAN	2	1	2	1
9	PANITERA PENGGANTI	5	7	5	5
10	JURUSITA	1	1	1	1
11	JURUSITA PENGGANTI	1		1	2
12	STAF	2	3	1	2
	JUMLAH	20	20	16	16

Sumber : Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi Tahun 2017

Tabel 7.11 diatas menunjukkan bahwa Hakim yang ada di Kota Bukittinggi sama jumlah laki-laki dan perempuan.

3. Polisi menurut Jabatan dan jenis kelamin

Tabel. 7.12 Data Kepolisian menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017

NO	JENIS KEPANGKATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L+P
1	Perwira Tinggi			
	a. Jendral Polisi			
	b. Komisariss Jendral Polisi			
	c. Inspektur Jendral Polisi			
	d. Brigadir Jendral Polisi			
2	Perwira Menengah (PAMEN)			
	a. Komisariss Besar Polisi			
	b. Ajun Komisariss Besar Polisi	1		1
	c. Komisariss Polisi	6		6
3	Perwira Pertama (PAMA)			
	a. Ajun Komisariss Polisi	8	2	10
	b. Inspektur Satu Polisi	21	2	23
	c. Inspektur dua Polisi	42	2	44
4	Bintara	283	34	417
		461	40	501

Sumber : Sumda Poresta Kota Bukittinggi

D. Pengurus organisasi sosial , kemasyarakatan dan politik

Tabel. 7.13 Data Organisasi Sosial, kemasyarakatan dan Politik Tahun 2017

No	Nama organisasi	Nama Pimpinan/Ketua	Alamat
1	PKK	Ny. Yesi Ramlan Nurmatias	Jl. Perwira Belakang Balok

2	GOW	Ny.Khadijah Irwandi	Jl. Perwira Belakang Balok
3	KPPI	Tuti Sofyan	
4.	LK2S	Ny.Yesi Ramlan Nurmatias	Jl. Perwira Belakang Balok
5	IWAPI	Arifa Inas	Jl. Perwira Belakang Balok
6	IKAPRI	Emmalinda Chaidir	Jl.Sudirman Birugo
7	IPEMI		
8	Forum Bundo		
9	P2TP2A	Ny.Yesi Ramlan Nurmatias	
10	Bundo Kanduang	Ny. Efni, S.Pd	Jirek

4. Pengurus harian Partai Politik

Tabel.7.14 Data Pengurus harian Partai Politik Kota Bukittinggi tahun 2017

No	Parpol	No SK/ Tanggal	Laki-laki	Perempuan	Jml
1	Partai Persatuan Pembangunan	05/SK/DPW/C/XII/2016, 1 Desember 2016	27	14	41
2	Golkar	005/4/GKSD/VIII/2016 22 Agustus 2016	42	22	64
3	Gerindra	09-0143/Kpts/DPP GERINDRA/2012 , 1 September 2012	36	19	55
4	Nasdem	589-SK/DPP-NASDEM/XI/2013,	53	38	91
5	PDIP	24.05/KPTS/DPC/DPP/III/2015 7 Maret 2015	9	7	16
6	Demokrat	... /SK/DPP.PD/DPC/VIII/2012	14	7	21
7	Hanura	SKEP/025/DPDSB/HANURA/ VIII / 2016 , 19 Agustus 2016	13	9	22

8	PKS	074/D/SKEP/AC00-PKS/1432, 2 Mei 2016	5	1	6
	JUMLAH		199	117	316

5. Kaukus perempuanan politik

SK KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) dengan nomor SK .Walikota Bukittinggi Nomor 476/671/DP3APPKB/VII-18 tanggal Juli 2018, tentang Pembentukan Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kota Bukittinggi Periode 2018 – 2022 .

6. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

Badan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang bertugas memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan dan pemindahan jabatan, kenaikan pangkat istimewa serta penunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai peserta diklat jabatan.Oleh sebab itu eksistensinya sangat penting dalam suatu pemerintahan dan institusi.

Pemerintahan Kota Bukittinggi sampai Agustus 2018 hanya ada 6 (enam) orang Badan Pertimbangan Jabatan ini. Dari enam orang itu semuanya adalah laki-laki.Tidak satu pun perempuan. Pada hal, jika dilihat dari jumlah PNS yang ada dilingkungan pemerintahan kota Bukittinggi perempuan merupakan jumlah yang terbanyak dibandingkan dengan PNS laki-laki.

Tabel. 7.15 Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Bukittinggi menurut Jenis Kelamin

No	BADAN PERTIMBANGAN JAB&KEPANGKATAN	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P
1	Sekretaris Daerah	1		1
2	Asisten I	1		1

3	Asisten II	1		1
4	Asisten III	1		1
5	Kepala BKPSDM	1		1
6	Kepala Inspektorat	1		1
	Jumlah	6		6

BAB VIII

BIDANG HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

A. BIDANG HUKUM

1. Kebijakan/Program/Kegiatan yang Responsif Gender Kota Bukittinggi

Tabel 8.1 Kebijakan/Program/Kegiatan yang Responsif Gender Kota Bukittinggi

No	SKPD	Kebijakan	Program	Kegiatan
1	DP3APPKB	Perwako No....Tahun 201.. tentang Penjabaran APBD Kota Bukittinggi Tahun 2017	KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK & PEREMPUAN.	FASILITASI PENGUATAN KOTA LAYAK ANAK MELALUI PEMBENTUKAN KELURAHAN RAMAH ANAK.
				FASILITASI PENGEMBANGAN & PERKUATAN FORUM ANAK DAERAH (FORDA) DAN PERINGATAN HARI ANAK.
			PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER & ANAK.	PERKUATAN & PENGEMBANGAN P2TP2A.
				Pembinaan Perempuan dalam Peningkatan Kualitas Keluarga
			PENINGKATAN KUALITAS HIDUP & PERLINDUNGAN PEREMPUAN.	PENGUATAN EKONOMI PEREMPUAN RENTAN MELALUI KIE, PELATIHAN, PEMBERIAN BANTUAN & PAMERAN.
			SDA	PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS).
			PENINGKATAN PERAN SERTA & KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN.	FASILITASI DAN PERKUATAN ORGANISASI PEREMPUAN.
				Bimbingan dan Pelatihan Politik oleh kantor Kesbangpol
				Bimbingan dan pelatihan jabatan Publik

			SDA	FASILITASI PERINGATAN HARI IBU.
			SDA	PENYELENGGARAAN, PEMBINAAN & PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.
			Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyelenggaraan , Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
				Pelayanan kesehatan di Puskesmas
				Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan
				Jaminan Persalinan
			Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi Kota Sehat
				Monitoring dan Pembinaan Pokjanel Posyandu dan DBD
			Perbaikan Gizi Masyarakat	Penanggulangan KEP, Anemia, GAKY, KVA dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
				Monitoring dan Evaluasi
				KIE ,Integrasi Program Gizi
			Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
			Pembinaan Anak Terlantar	
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	
			Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Pelayanan Kesehatan Lansia
			Program Wajib Belajar 9 tahun	Penunjang Operasional SD/SLTP
			Pendidikan Luar Biasa	Penyelenggaraan SDLB Manggis Ganting
			Pendidikan Non Formal	Penyelenggaraan Pendidikan Non formal paket A setara SD
				Peningkatan Kompetensi Warga Belajar Paket C (Paket C Vokasional)
				Penyelenggaraan UPTD SKB Kota Bukittinggi
				Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A,B dan C
				Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket B setara SMP
				Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket C setara SMA
				Pemberian Pendidikan Dasar membaca Al Quran
			Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	
			Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	
			Pencegahan Penanganan Rehabilitasi Narkoba	
			Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Keluarga Berencana	Pelayanan KIE/Teknik Motivasi

				dan konseling KB/KS
				.kegiatan pelayanan KB Serentak dan komplikasi
				Pembelian Penghargaan KB Teladan
				Kegiatan Fasilitasi Koalisi Kependudukan
				Kegiatan Penunjang Operasional PPKBK, Sub PPKBK dan Kader Poktan
				Kegiatan Fasilitasi Lapangan Program KKBPK
				Kegiatan Fasilitasi / Pelaksanaan Kampung KB
				Kegiatan Penunjang Operasional Peserta KB, IUD, Implant dan Kadr KB
				Kegiatan Penyelenggaraan Bimbingan Terpadu Program KKBPK
				Kegiatan Pelatihan Moto fator MOP bagi Peserta KB pria
				Operasional Penyuluhan KB Bantuan Operasional Keluarga
				Pusat Informasi Konseling Remaja
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Pelatihan KRR bagi PS/KS
				Fasilitasi Program Generasi Berencana
				Kancah Bakti Saka Kencana
			Program Pelayanan Kontrasepsi	Penunjang Operasional Klinik KB
				Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Poktan

Tabel 8.2 Peraturan dan Kebijakan Daerah yang Responsif Gender

No	Bentuk/ Jenis Peraturan	Nomor Peraturan	Judul Peraturan	Perangkat Daerah Pemrakarsa
1	Peraturan Daerah		RPJMD Tahun 2016 - 2021	Bappeda
2	Peraturan Daerah	Nomor. 04 Tahun 2015	Perlindungan Perempuan dan Anak	PPKB
3	Peraturan Daerah	Nomor 1 Tahun 2012	Kawasan Tanpa Rokok	Dinas Kesehatan
4	Peraturan Walikota	Nomor. 12 Tahun 2015	Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Bukittinggi	PPKB
5	Keputusan Walikota	188.45-57 -2018	Pembentukan Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Resposif Gender Kota Bukittinggi Tahun 2018	DP3APPKB dan Bapelitbang
3	Keputusan Walikota	188.45- 158 - 2018	Pembentukan Kelompok Kerja Data	DP3APPKB

			Terpilah Gender dan Anak Kota Bukittinggi	
4	Surat Edaran Walikota	463/004/PPKB/V/- 2015 tanggal 7 April 2015	Percepatan Pengarusutamaan Gender	
6	Keputusan Walikota	188-45 57 – 2018 ,Tahun :2018	Pembentukan Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Kota Bukittinggi Tahun 2018	
7	Keputusan Walikota	Nomor :188. 45-58 – 2018 ,Tahun :2018	Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi Tahun 2018	
8	Keputusan Walikota Bukittinggi	Nomor :188. 45-233 – 2015 ,Tahun :2015	Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Tingkat Kota Bukittinggi Masa Bakti 2015 – 2017	
9	Keputusan Walikota Bukittinggi	Nomor :188.45.349-2016 ,Tahun :2016	Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Tingkat Kota Bukittinggi Masa Bakti 2016 – 2018	
10	Keputusan Walikota Bukittinggi	Nomor :188- 45-202 – 2015 ,Tahun :2015	Perubahan Keputusan Walikota Nomor. 188-45- 202 – 2015 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Seayun Selangkah Kota Bukittinggi Periode 2015- 2018	
11	Keputusan Walikota Bukittinggi	Nomor :188. 45 – 015- 2016 ,Tahun :2016	Penetapan Kelurahan Benteng Pasar Atas Sebagai Kelurahan Layak Anak di Kota Bukittinggi	

12	Keputusan Walikota Bukittinggi	Nomor :188. 45 – 016- 2016 ,Tahun :2016	Penetapan Kelurahan Tarok Dipo Sebagai Kelurahan Layak Anak di Kota Bukittinggi	
13	Keputusan Walikota Bukittinggi	Nomor :188. 45 – 182- 2015 ,Tahun :2015	Penetapan Kelurahan Layak Anak di di Kota Bukittinggi	
14	Surat Edaran Walikota Bukittinggi	Nomor :27/Din.Kes/II- 2015 ,Tahun :2015	Kawasan Tanpa Rokok	
15	Surat Edaran Walikota Bukittinggi	Nomor :478 – 25/ DP3APPKB/I/2016 ,Tahun :2016	Pemberian ASI Eksklusif	
16	Surat Edaran Walikota Bukittinggi	Nomor :478 – 22/ DP3APPKB/I/2017 ,Tahun :2017	Penyediaan Ruang Laktasi	
17	Keputusan Walikota Bukittinggi	Nomor :188. 45 – 012- 2017 ,Tahun :2017	Penunjukan Puskesmas Rasimah Ahmad sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kota Bukittinggi	
18	Keputusan Walikota Bukittinggi	Nomor :188. 45 – 017- 2016 ,Tahun :2016	Penunjukan Puskesmas Gulai Bancah sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kota Bukittinggi	
19	Keputusan Walikota Bukittinggi	Nomor :188. 45 – 018- 2016 ,Tahun :2016	Penunjukan Puskesmas Mandiangin sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kota Bukittinggi	
20	Keputusan Walikota Bukittinggi	Nomor :188. 45 – 36- 2015 ,Tahun :2015	Penunjukan Puskesmas Plus Mandiangin sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kota Bukittinggi	
21	Keputusan Walikota Bukittinggi	Nomor :188. 45 – 37- 2015 ,Tahun :2015	Penunjukan Puskesmas Guguk Panjang sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kota Bukittinggi	
22	Keputusan Walikota	Nomor :188. 45 – 160- 2016 ,Tahun	Penetapan Guguk	

	Bukittinggi	:2016	Panjang Sebagai Kecamatan Layak Anak (KELANA) di Kota Bukittinggi	
23	Keputusan Walikota Bukittinggi	Nomor :188. 45 – 107- 2016 ,Tahun :2016	Penetapan Aur Birugo Tigo Baleh Sebagai Kecamatan Layak Anak (KELANA) di Kota Bukittinggi	
24	Keputusan Walikota Bukittinggi	Nomor :188. 45 – 142- 2015 ,Tahun :2015	Penetapan Mandiangin Koto Selayan Sebagai Kecamatan Layak Anak (KELANA) di Kota Bukittinggi	
25	Keputusan Walikota Bukittinggi	Nomor :188. 45 – 95- 2014 ,Tahun :2014	Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Kota Bukittinggi Tahun 2014- 2017	

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017

Tabel 8.3 ...Peraturan dan Kebijakan Daerah yang terkait Perlindungan Perempuan dan Anak

No	Bentuk/ Jenis Peraturan	Nomor Peraturan	Judul Peraturan	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Ulasan/ Analisa
1	Peraturan Daerah Kota Bukittinggi	Nomor. 4 Tahun 2015	Perlindungan Perempuan dan Anak	Kantor PPKB	
2	Peraturan Daerah	Nomor 1 tahun 2015	Bangunan Gedung	Dinas PUPR	Pada Pasal 66 ayat 1: Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk penyandang cacat, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia. Pasal 66 ayat 2 Penyedia tersedianya

					fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertical antar ruang dalam bangunan gedung, akses evakuasi termasuk bagi penyandang cacat, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia
3.	Keputusan Ka Dinas Kebakaran.	188.45.14/Disk ar-02/2017	Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bahaya kebakaran dan Bencana bagi masyarakat.	Dinas Kebakaran.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan alat-alat pemadam kebakaran dan pencegahan bahaya kebakaran kpd anak PAUD serta Anak TK. - Memberikan pengetahuan kpd siswa SLTA thd pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran.
4	Keputusan Walikota	Nomor 30 Tahun 2016	Pemanfaatan Teknolgi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	Dinas Kominfo	

Tabel 8.4. Daftar Lembaga Masyarakat/Organisasi Masyarakat/LBH yang Peduli Perempuan dan Anak Tahun 2015 sd 2017

Kecamatan	Nama Kelembagaan/ LSM/LBH	Nama Pimpinan/Ketua	Alamat Kantor
Mandiingin Koto Selayan	Parik Paga Campago Guguak Bulek	Donny Syahputra, S.HI	Jl. Mr Asaat No 43 Kel Campago Guguak Bulek
	For De Kock Society in Sosial (Forsis)	Khairul Anwar, S.Ag, MH	Jl. H. Abdul Manan No 3 Kel. Campago Guguak Bulek
	Flora Training Center	Nentien Destri, AMk. M.Pd	Jl. Abdul Manan Sarajo Kel. Guguak Bulek

Guguak Panjang	LKS Kita Semua Sama (KISESA)	Antoni Firdaus	Jl. Tuanku Kubu Rt 001 RW 001 Kel Kayu Kubu
	Persatuan Olahraga Pernafasan Indonesia (PORPI)	Yusra Adek .S.Sos, MM	Jl. Ahmad Yani, No.95 Kel. Benteng Pasar Atas

Sumber : Kesbangpol Tahun 2017

B. BIDANG SOSIAL BUDAYA

Tabel 8.5 Jumlah Anak Jalanan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2015,2016 dan 2017

No	Kecamatan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Mandiingin Koto Selayan	1	0	1	6	1	7	6	2	8
2	Guguak Panjang	-	-	-	9	10	19	7	7	14
3	Aur Birugo Tigo Baleh	1	0	1	1	-	1	2	1	3
	JUMLAH	2	0	2	16	11	27	15	10	25

Sumber : Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2017

Menurut Permensos No 08 Tahun 2012, anak jalanan merupakan anak yang rentan bekerja dijalanan dan/atau menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan. Berdasarkan tabel diatas anak jalanan terbanyak pada tahun 2016 dan 2017 berada di kecamatan Guguk Panjang, dan lebih julahnya sama banyak antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 8.6. Jumlah Anak Terlantar (Karena Putus Sekolah) Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2015,2016 dan 2017

No	Kecamatan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Mandiingin Koto Selayan	105	63	168	118	61	179	118	61	179
2	Guguak Panjang	104	65	169	117	44	161	125	124	249
3	Aur Birugo Tigo Baleh	54	41	95	76	20	96	85	67	152
	JUMLAH	263	169	432	311	125	436	328	252	580

Sumber : Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2017

Anak terlantar sesuai dengan Permensos No 08 Tahun 2012, merupakan seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Dari tabel diatas terlihat terjadinya peningkatan anak terlantar semenjak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 baik laki-laki ataupun perempuan.

Tabel 8,7 Jumlah Anak yang Ditampung di Panti Asuhan dan Non Panti Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2015,2016 dan 2017

No	Kecamatan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Mandiingin Koto Selayan	26	22	48	30	15	45	22	23	45
2	Guguak Panjang	78	92	170	78	94	172	82	93	175
3	Aur Birugo Tigo Baleh	4	3	7	4	3	7	4	3	7
	JUMLAH									

Sumber : Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2017

Tabel 8.8. Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2015,2016 dan 2017

No	Kecamatan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Mandiingin Koto Selayan	3	0	3	7	4	11	5	2	7
2	Guguak Panjang	3	0	3	2	0	2	3	0	3
3	Aur Birugo Tigo Baleh	2	1	3	6	1	7	4	1	5
	JUMLAH	8	1	9	15	5	20	12	3	15

Sumber : Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2017

Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Permensos No 08 Tahun 2012, merupakan seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri, kemabli dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau menjalani kehidupan secara normal. Menurut tabel diatas , jumlah bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah sebanyak 15 orang lebih sedikit dari pada tahun 2016 dan 2015.

Tabel 8.9 Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2015 sd 2017

No	Kecamatan	2015	2016	2017
1	Mandiingin Koto Selayan	472	472	424
2	Guguak Panjang	332	436	211
3	Aur Birugo Tigo Baleh	96	200	185
	JUMLAH	900	1580	820

Sumber : Dinsos Tahun 2017

Perempuan rawan social ekonomi dengan Permensos No 08 Tahun 2012 merupakan seorang perempuan dewasa menikah / belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kiebutuhan pokok sehari-hari. Berdasarkan tabel diatas , jumlah perempuan rawan social dan ekonomi terbanyak di kecamatan Mandiingin Koto selayan, 424 orang.

2. Penduduk Lansia menurut Pendidikan yang ditamatkan

Table. 8. 10 Jumlah penduduk Usia 60 tahun ke atas berdasarkan tingkat Penddikan Tahun 2017

No	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	LK + Pr
1.	Tidak /belum Sekolah	45	106	151
2	SD	223	430	653
3	Tamat SD	1300	2038	3338
4	SMP	1183	1239	2422
5	SMA	2089	1847	3936

6	D I/DII	46	222	268
7	D III	206	233	439
8	S1	387	244	631
9	S2	44	20	64
10	S3	5	2	7

BAB IX

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

A. KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Tabel. 9.1 Korban kekerasan terhadap perempuan menurut umur di kota Bukittinggi Tahun 2017

No	Kecamatan	Kelompok Umur			TOTAL
		0-<18	18->25	>25	
1	MKS	3			3
2	GP	6			6
3	ABTB	2			2
	JUMLAH	11			11

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas yang menjadi korban kekerasan sebagian besar anak di bawah umur, pada umumnya anak korban kekerasan selalu di bujuk rayu dan di iming-imingi dengan recehan sehingga anak menjadi penurut dan tidak mampu menolak atau melakukan perlawanan kepada pelaku.

Tabel. 9.2 Korban kekerasan terhadap perempuan menurut tingkat pendidikan di kota Bukittinggi Tahun 2017 .

No	Kecamatan	Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat Sekolah	SD	SLTP	SLTA	PT
1	MKS	1	-	2	1	-	-
2	GP	1	-	5	-	-	-
3	ABTB	-	-	-	1	-	-
	JUMLAH	2	-	7	2	-	-

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Dari data di atas dapat menunjukkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan cenderung berpendidikan rendah, Tingkat pengetahuan yang rendah dan kurangnya Informasi menjadi faktor pemicu kekerasan terhadap perempuan. Majunya pendidikan juga turut mengurangi munculnya kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Untuk itu kesadaran akan pentingnya masyarakat untuk bisa mengecap pendidikan perlu digalakkan.

Tabel 9.3. Korban kekerasan terhadap perempuan menurut Status Pekerjaan di kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Berusaha sendiri	Berusaha di bantu buruh tidak tetap	Berusaha di bantu buruh tetap	Buruh / Karyawan/ Pegawai	Pekerjaan bebas di Pertanian	Pekerjaan bebas di Non Pertanian	Pekerjaan Keluarga	Pelajar/ lain-lain
1	MKS								6
2	GP								3
3	ABTB								2
	JUMLAH								11

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Dari data di atas dapat di simpulkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan cenderung terjadi pada pelajar, ini di sebabkan karena :

- anak terutama pelajar cenderung tidak akan mengadukan kekerasan yang di alami karena khawatir akan menjadi pihak yang disalahkan.
- Anak sekolah mudah terpengaruh dengan bujuk rayu orang dewasa
- Tingkat ketakutan yang tinggi terhadap orang dewasa
- Penyalahgunaan gadget pada anak
- Mudah dibujuk rayu dengan pemberian uang atau hadiah
- Belum punya pengetahuan dan memahami tentang pendidikan seks
- Kurangnya pengawasan orang tua dan keluarga
- Kurangnya pengetahuan agama dalam keluarga.

Tabel 9.4.Korban kekerasan terhadap perempuan menurut status perkawinan di Kota Bukittinggi.Tahun 2017

No	Kecamatan	Belum Kawin	Kawin	Cerai Mati	Cerai hidup
1	MKS	3			
2	GP	6			
3	ABTB	2			
	JUMLAH	11			

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

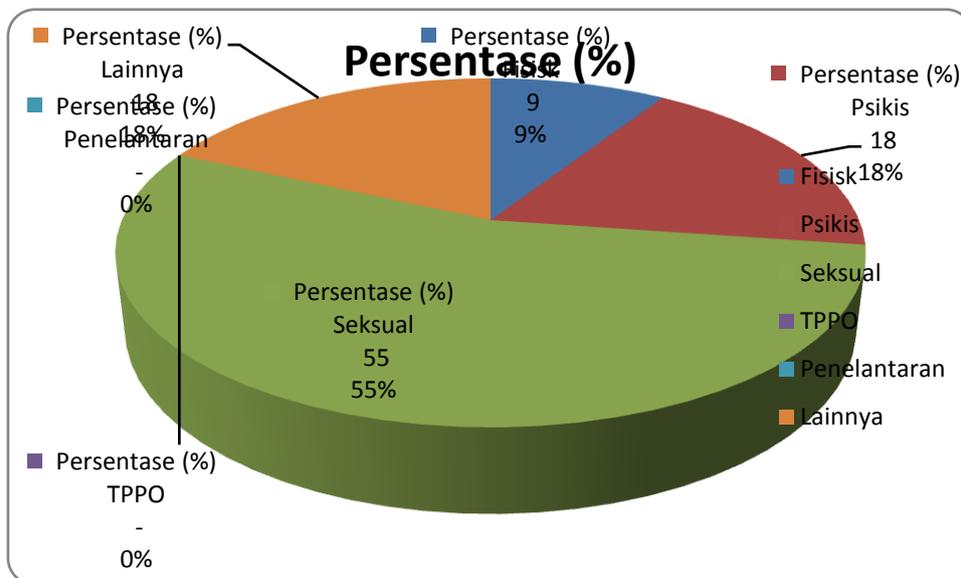
Berdasarkan tabel di atas yang menjadi korban kekerasan sebagian besar adalah perempuan yang belum kawin, hal ini disebabkan karena korban yang belum kawin tergolong kepada anak yang sangat mudah dibujuk, diperdaya, jiwa yang masih labil dan takut kepada ancaman orang dewasa, sehingga mereka tidak mempunyai kekuatan dan perlawanan atas kekerasan yang dialaminya, ketidak mengertian tentang seks serta ketidak tahuan kepada siapa akan melaporkan atas kekerasan yang dialaminya

Tabel 9.5. Korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kekerasan di Kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	Lainnya
1	MKS	1	2				
2	GP			6			
3	ABTB						2
	JUMLAH	1	2	6			2

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Gambar 9.1 Persentase Korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kekerasan di kota Bukittinggi.



Gambar diatas menunjukkan sebagian besar (55%) kekerasan yang dialami perempuan adalah kekesarasan Seksual, hal ini di sebabkan :

- posisi perempuan yang dianggap lemah
- Media elektronik yang bisa di akses bebas untuk menayangkan tentang pornografi dan pornoaksi
- Pergaulan bebas
- Kurangnya pengawasan orang tua dan masyarakat
- Kurangnya pemahaman agama.

Tabel. 9.6 Korban kekerasan terhadap perempuan menurut Tempat kejadian di kota Bukittinggi Tahun 2017.

No	Kecamatan	Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya
1	MKS	3		
2	GP			6
3	ABTB	1		1
	JUMLAH	4		7

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Dari data di atas dapat di simpulkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan lebih sering terjadi di luar rumah.

Tabel. 9.7 Korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis Pelayanan di kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Penanganan pengaduan	Pelayanan kesehatan	Rehabilitasi sosial	Penegakan & bantuan hukum	Pemulangan & reintegrasi
1	MKS	3				
2	GP	6				
3	ABTB	2				
	JUMLAH	11				

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Dari 11 orang yang datang ke P2TP2A, tidak melanjutkan kasus adalah pilihan keluarga korban

Tabel. 9.8 Korban kekerasan terhadap perempuan menurut Frekuensi Kekerasan di kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Frekuensi Kekerasan		
		Baru	Berulang	Rujukan
1	MKS	3		
2	GP	6		
3	ABTB	2		
	JUMLAH	11		

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Para korban perempuan yang melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, pada umumnya didominasi oleh rasa malu. Sehingga, mereka hanya melaporkan kejadiannya sekali dan dilanjutkan dengan konsultasi lanjutan. Pelaporan biasanya dilakukan setelah terjadi kekerasan fisik maupun psikis yang berulang. Saat perempuan itu sudah benar-benar tidak sanggup lagi menanggung kekerasan, mereka baru melaporkan kepada P2TP2A.

Tabel 9.9 Pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut Tingkat Pendidikan di kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan											
		Tidak/belum sekolah		Belum Tamat SD		SD		SLTP		SLTA		PT	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	MKS					1				2			
2	GP					4		2					
3	ABTB											2	
	JUMLAH					5		2		2		2	

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Tingkat pendidikan yang rendah merupakan penyebab tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, dari tabel di atas terlihat lebih dari 50% pelaku kekerasan terhadap perempuan di Bukittinggi berpendidikan di bawah SLTP ,

Tabel 9.10 Pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut Status Pekerjaan di Kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Berusaha sendiri	Berusaha di bantu buruh tidak tetap	Berusaha di bantu buruh tetap	Buruh / Karyawan/ Pegawai	Pekerjaan bebas di Pertanian	Pekerjaan bebas di Non Pertanian	Pekerjaan Keluarga	Pelajar/ lain-lain
1	MKS	3							
2	GP	2							4
3	ABTB				2				
	JUMLAH	5			2				4

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Tabel 9. 11. Pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut Hubungan dengan korban di kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Hubungan Dengan Korban						
		Suami	Orang Tua		Keluarga		Keluarga lainnya	
			L	P	L	P	L	P
1	MKS		2		1			
2	GP						6	
3	ABTB				2			
	JUMLAH		2		5			

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Pada 2014 lalu kasus kekerasan pada perempuan di ranah komunitas 60% pelaku kekerasan adalah orang dekat, dan dari tabel di atas bisa di baca rata rata pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban

B. KEKERASAN TERHADAP ANAK

Tabel. 9. 12 JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT JENIS KEKERASAN DAN JENIS KELAMIN, PER KECAMATAN DI KOTA BUKITTINGGI													
NO	KEC	2017											
		JENIS KEKERASAN											
		FISIK		PSIKIS		SEKSUAL		EKSPLOITASI		PENELANTARAN		LAINNYA	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	MKS		1		1		1						
2	GP					5	7						
3	ABTB			1	2	5							
JUMLAH		0	1	1	3	10	8	0	0	0	0	0	0

Sumber : P2TP2A Kota Bukittinggi

Kekerasan pada anak biasanya terjadi secara Fisik, psikis dan sexual, dan lebih banyak terjadi pada anak perempuan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi terhadap anak, adalah:

1) kekerasan fisik ; yang termasuk kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat tubuh yang menyebabkan kematian ataupun tidak. Bentuk-bentuknya antara lain memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/senjata, membunuh.

2) kekerasan psikologi/mental ; kekerasan ini meliputi perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya, seperti berteriak-teriak, mengancam, merendahkan, menyumpah serapah, melecehkan, menguntit, dan memata-matai serta tindak-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut yang ditujukan kepada korban atau keluarga dekatnya.

3) kekerasan ekonomi; kekerasan ini adalah setiap perbuatan yang mengeksploitasi anak atau menelantarkan anggota keluarga, misalnya

kelalaian memberikan kebutuhan hidup seperti makan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan sebagainya.

4) kekerasan seksual; kekerasan mencakup pelecehan seksual sampai memaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, bentuk-bentuk tersebut misalnya menyentuh, meraba, mencium, memaksa korban melihat pornografi, ucapan yang merendahkan, melecehkan atau menyakiti korban. Untuk kekerasan seksual ini, si pelaku biasanya orang dekat yang nekat melakukannya.

Tabel. 9. 14 KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK MENURUT TEMPAT KEJADIAN DAN JENIS KELAMIN PER KECAMATAN DI KOTA BUKITTINGGI

NO	KEC	TEMPAT KEJADIAN											
		CAFE		PANTI PIJAT		HOTEL/ TEMPAT PENGINAPAN		LAINNYA		PENELANTARAN		LAINNYA	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	MKS												
2	GP												
3	ABTB												
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : P2TP2A Kota Bukittinggi

Eksplorasi seksual merupakan bentuk paksaan dan kekerasan terhadap anak dan sejumlah tenaga kerja paksa dan bentuk perbudakan modern. Sebuah pernyataan dari Kongres Dunia untuk melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, yang diselenggarakan di Stockholm pada tahun 1996, mendefinisikan sebagai: 'pelecehan seksual oleh orang dewasa dan remunerasi tunai atau barang kepada anak atau orang ketiga atau orang lain. Anak diperlakukan sebagai objek seksual dan sebagai objek komersial termasuk pelacuran anak, pornografi anak, pariwisata seks anak dan bentuk lain dari transaksional seksual di mana seorang anak terlibat dalam kegiatan seksual untuk dapat memiliki kebutuhan utama yang terpenuhi, seperti makanan, tempat tinggal atau akses ke pendidikan. Ini termasuk

bentuk transaksional seksual di mana kekerasan seksual terhadap anak tidak dihentikan atau dilaporkan oleh anggota keluarga, karena manfaat yang diperoleh oleh keluarga dari pelaku. juga berpotensi mencakup perjudohan yang melibatkan anak di bawah usia 18 tahun, di mana anak belum bebas menyetujui pernikahan dan di mana anak mengalami pelecehan seksual.

Tabel. 9.15 LEMBAGA LAYANAN YANG MENANGANI ANAK KORBAN KEKERASAN, PER KECAMATAN DI KOTA BUKITTINGGI

NO	KECAMATAN	RPTC	LBH	PKT	PPT	UPPA	TRAUMACENTER	WOMANCRISISCENTER	SHELTER	RUMAHSINGGAH	RPSA	PANTI ASUAHAN ANAK	P2TP2A
1	MKS												3
2	GP												12
3	ABTB												8
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23

P2TP2A adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak korban kekerasan, melalui wahana operasional pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah daerah. Di antara upaya yang dilakukan adalah pelayanan pelaporan/pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulihan korban secara pelayanan bantuan dan penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, pendampingan tokoh agama, konsultasi dan berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak.

Kota Bukittinggi adalah kota terbesar kedua di Sumatera Barat. Selain itu, Bukittinggi juga menjadi pusat perdagangan dan wisata. Ini jelas berdampak pada kompleksnya persoalan sosial kemasyarakatannya. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mencoba hadir dan memberi jalan keluar dalam persoalan pemberdayaan perempuan dan anak. Pada akhir tahun 2009 P2TP2A Saayun Salangkah didirikan di Kota Bukittinggi, yang operasionalnya dimulai pada tahun 2010.

Tabel. 9. 16 JUMLAH KORBAN KEKERASAN PADA ANAK

NO	KECAMATAN	JENIS PELAYANAN YANG DIBERIKAN									
		PENANGANAN PENGADUAN		PELAYANAN KESEHATAN		REHABILITASI SOSIAL		PENEGAKAN DAN BANTUAN HUKUM		PEMULANGAN & REINTEGRASI	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	MKS		3								
2	GP	6	6								
3	ABTB	6	2								
JUMLAH		12	11	0	0	0	0	0	0	0	0
		23									

Sumber :

Dampak kekerasan terhadap anak, apa pun tujuannya, sama sekali tidak bisa dianggap sepele. Kita bisa melihatnya dari penelitian UNICEF yang mengumpulkan dan menyusun berbagai dampak perlakuan kejam terhadap anak. Penyusunan itu kemudian digolongkan ke dalam empat area, yaitu kesehatan fisik, kesehatan mental, keluaran kekerasan, dan dampak terhadap pendidikan dan ketenagakerjaan.

BAB X

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan data yang telah dikemukakan pada profil gender dan anak Kota Bukittinggi Tahun 2018, terdapat beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap penilaian keadilan dan kesetaraan gender. antara lain :

1. Ketersediaan data
 - a. Ketersediaan data sangat penting dalam menyusun suatu analisa yang tepat. Sehingga dapat digunakan oleh para pemangku dan pengambil kebijakan di Kota Bukittinggi untuk mengevaluasi kembali perencanaan pembangunan yang sudah berlangsung maupun program pembangunan yang akan datang, apakah sudah responsive gender.
 - b. Data terpilah perlu dijadikan isu strategis di seluruh sektor baik instansi pemerintah atau non pemerintah, lembaga masyarakat serta semua lini pembangunan mulai dari Tingkat Kota maupun tingkat kecamatan sampai kelurahan sehingga akan mempermudah komunikasi dan koordinasi dalam pembuatan format serta diskripsi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis gender dan anak.
2. Kependudukan
 - a. Dari Proyeksi penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dari penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin sebesar 94,44. Komposisi Penduduk perempuan yang produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang produktif yaitu 51,81 % berbanding 48,19% ,
 - b. 17,39 % kepala keluarga di Kota Bukittinggi adalah perempuan, hal ini berarti perempuan haruslah memiliki kemampuan baik secara

ekonomi, moral dan spiritual untuk menjadi pengambil keputusan di rumah tangganya.

3. Pendidikan

- a. Perempuan memiliki Angka Partisipasi Sekolah hampir sama dengan laki-laki, yang berarti kesempatan perempuan untuk mengakses pendidikan telah menambah angka partisipasi wanita dalam pendidikan. Konsekuensinya terhadap perencanaan pembangunan yang harus dilakukan pemerintah adalah menyediakan lapangan kerja bagi penduduk perempuan.
- b. Hampir seluruh penduduk Kota Bukittinggi sudah bisa baca tulis hanya 0,19% penduduk perempuan yang masih buta huruf. Hal ini menunjukkan pencapaian pendidikan dasar yang efektif dan berhasilnya program keaksaraan.

4. Kesehatan

- a. Telah terjadi penurunan yang positif terhadap Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, hal ini menandakan semakin meningkatnya kesadaran untuk hidup sehat serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kota Bukittinggi
- b. Peningkatan kasus HIV AIDS di Bukittinggi tidak saja terjadi pada laki-laki tetapi kasus pada perempuan juga sudah mulai mengkhawatirkan, diperlukan upaya yang lebih maksimal untuk bisa menekan munculnya kasus baru.
- c. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga masih rendah, perlu ditingkatkan promosi kesehatan sehingga mampu merubah perilaku masyarakat yang masih kurang tentang PHBS.
- d. Partisipasi KB aktif masih di dominasi oleh perempuan, karena hanya 7,2 % laki-laki yang berpartisipasi aktif untuk ber KB. Diperlukan terobosan yang mampu meningkatkan partisipasi KB pria.

5. Ekonomi dan Ketenagakerjaan

- a. Keterlibatan perempuan pada kegiatan ekonomi (pasar kerja) lebih rendah dari pada laki-laki , ditandai dengan rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan dibandingkan laki-laki.
- b. Lapangan pekerjaan yang terbanyak baik laki-laki maupun perempuan banyak pada lapangan pekerjaan perdagangan, eceran, rumah makan , hotel dan jasa.

6. Politik dan pengambil keputusan.

- a. Masih perlu dipersiapkan perempuan-perempuan yang berpotensi dan tertarik untuk terjun ke dunia politik praktis (legislatif), untuk dapat dipersiapkan duduk bersaing dengan laki-laki menjadi caleg caleg yang dipercaya masyarakat
- b. Masih sedikitnya Pengambil keputusan di Kota Bukittinggi yang berjeniskelamin perempuan, sehingga kebijakan –kebijakan yang diambil belum sepenuhnya memihak kepada kepentingan perempuan.

7. Hukum dan Sosial Budaya

- a. Kebijakan-kebijakan yang responsif gender di Kota Bukittinggi sudah mulai digerakkan, terbukti sudah terdapatnya beberapa SKPD yang sudah memprakarsai perencanaan yang berbasis gender.
- b. Permasalahan sosial masih memerlukan perhatian yang komprehensif dari semua pihak, karena pemecahan permasalahan social disebabkan oleh berbagai macam sebab, seperti ekonomi, keluarga , masyarakat dan pemahaman agama.

8. Kekerasan terhadap perempuan dan anak

Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dilaporkan pada tahun 2017 belum dapat menggambarkan situasi yang sesungguhnya, karena budaya malu yang ada pada

masyarakat kita masih menjadikan kasus kekerasan ini tidak semua yang dilaporkan. Disamping itu perlu upaya maksimal untuk memperkenalkan lembaga P2TP2A ke masyarakat agar masyarakat tahu kemana harus melaporkan kekerasan yang dialami baik dirinya maupun lingkungan sekitarnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditulis pada buku Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2018 ini, maka ada beberapa hal yang dapat disarankan :

1. Perlu dilakukan koordinasi , kerjasama dan komunikasi yang lebih baik antar lembaga-lembaga yang terlibat dalam program pengarusutamaan gender dan anak untuk dapat mempersiapkan data dan informasi yang lebih lengkap, mudah dan efektif.
2. Perlu dilaksanakan pengkajian yang mendalam terhadap hasil analisa dan peranan masing-masing lembaga dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi keadilan dan kesetaraan gender di Kota Bukittinggi.